

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 memuat Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu : ***“Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”***.

Visi 5 (lima) tahun kedepan ini dijabarkan melalui misi ***“Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”***, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Adapun kemakmuran Jawa Timur diarahkan untuk ***“Agawe Wong Cilik Bisa Melu Gemuyu”***.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dilaksanakan dengan 4 (empat) strategi yaitu :

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri;
2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro poor*);
3. Pengarusutamaan gender;
4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, **terutama melalui** pengembangan agroindustri/agrobisnis.

Berdasarkan pada visi, misi dan strategi pembangunan tersebut, disusun 9 (Sembilan) agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur Tahun 2009-2014 sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin;
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik;
3. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan penyediaan **infrastruktur** pertanian dan pedesaan;

4. Memelihara

- 4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang;
- 5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima;
- 6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;
- 7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender;
- 8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia;
- 9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi social ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

2.2. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD 2009-2014, kinerja pembangunan Jawa Timur tahun 2010 diukur berdasarkan pada 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu : Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Disparitas Wilayah, serta Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 2.1. Matrik Penetapan Indikator Utama

Matrik Penetapan Indikator Kinerja Utama										
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2008		Tahun 2009		Target	Target	Target	Target	Target
		Target	Capaian	Target	Capaian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,6	6,42	6,20 - 6,40	5,08	6,00 - 6,20	5,80 - 6,00	5,60 - 5,80	5,40 - 5,60	5,20 - 5,40
2	Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk (%)	15,9	16,97	16,50 - 16,90	16,68	15,50 - 16,50	15,00 - 15,50	14,50 - 15,00	14,00 - 14,50	13,50 - 14,00
3	Pertumbuhan ekonomi ADHK Tahun 2000 (%)	6,3	5,9	4,00 - 4,50	5,01	4,00 - 4,50	5,00 - 5,50	5,00 - 5,50	5,50 - 6,00	5,50 - 6,00
4	Indeks Disparitas Wilayah	101	115,33	115,10 - 115,50	116,02	114,70 - 115,10	114,40 - 114,70	114,10 - 114,40	115,80 - 114,10	113,50 - 113,80
5	Indeks Pembangunan Manusia	66	68,92	68,90 - 69,50	70,98	69,00 - 69,50	69,50 - 69,90	69,90 - 70,10	70,10 - 70,50	70,50 - 71,00

Kelima indikator tersebut merupakan representasi dari kinerja 9 (sembilan) agenda pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tingkat

a. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Secara umum terjadinya pengangguran dapat disebabkan beberapa faktor antara lain : terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia, pertumbuhan penduduk yang relative cepat, iklim usaha yang kurang kondusif, terjadinya pemulangan **Tenaga Kerja Indonesia (TKI)** dari luar negeri, kualitas SDM yang tidak linier dengan tingkat pendidikan yang dicapai, dan lebih *urban oriented* dibanding *rural oriented*. Sementara akibat dari tingginya tingkat pengangguran adalah ketidakstabilan sosial-ekonomi.

Dari hasil pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2009, hampir tidak terlihat adanya dampak krisis ekonomi global. Pengangguran justru mengalami penurunan ketika terjadi krisis ekonomi. Namun demikian berkurangnya jumlah penganggur seperti yang disajikan pada Tabel 2.2., harus dipahami secara hati-hati, agar tidak menimbulkan persepsi yang salah terhadap kondisi yang ada, khususnya jika dikaitkan dengan kondisi kesejahteraan penduduk secara luas.

Tabel 2.2. Indikator Ketenagakerjaan Agustus 2005- Agustus 2009

Kegiatan Utama	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Bekerja (jutaan)	17,690	17,670	18,,751	18,882	19,305
2. Penganggur (jutaan)	1,646	1,575	1,366	1,296	1,033
3. TPAK (%)	68,77	67,36	68,99	69,32	69,25
4. TPT (%)	8,51	8,19	6,79	6,42	5,08

Sumber : Hasil Sakenas 2007 – 2009, BPS Jawa Timur

Diperkirakan pada kondisi krisis, tenaga kerja Jawa Timur melakukan mekanisme penyesuaian dengan cara mencari pekerjaan sampingan dan mempekerjakan anggota rumahtangga usia produktif. Salah satu indikasi yang bisa ditunjukkan dari hasil Sakernas adalah banyak ibu rumah tangga yang masuk ke pasar kerja baik sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga maupun tenaga kerja usia lanjut yang sebenarnya sudah berada di luar angkatan kerja karena pensiun, dan kembali masuk dalam pasar kerja sebagai pekerja yang berstatus pengusaha mandiri. Kondisi ini mengklarifikasikan peranan signifikan sektor informal sebagai penyangga (buffer) perekonomian. Oleh karena itu sebaiknya berhati-hati dalam

Tabel 2.3.

membuat proyeksi ketenagakerjaan yang mengkaitkan angka pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja di Jawa Timur Tahun 2008 - 2009

Bukan Angkatan Kerja	2008	2009
(1)	(2)	(3)
1. Sekolah	1.949.264	1.864.810
2. Mengurus Rumah tangga	5.624.245	5.500.513
3. Lainnya	1.459.055	1.567.651
Jumlah	9.032.564	8.932.974

Sumber : Hasil Sakenas 2008 – 2009, BPS Jawa Timur

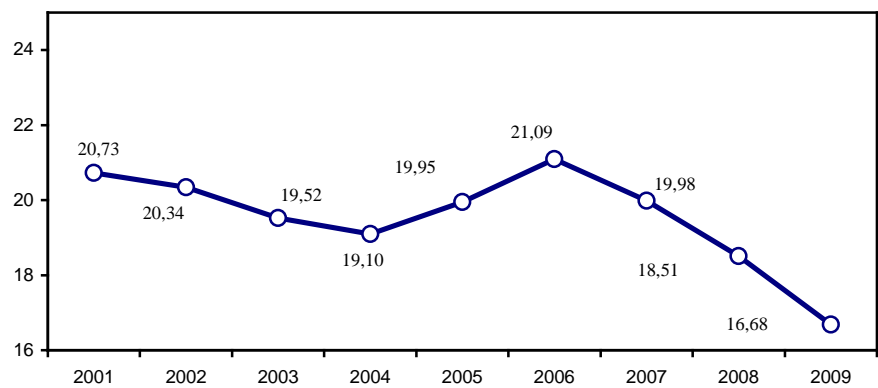
Hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan terkait dengan masalah ketenagakerjaan adalah dampak krisis ekonomi di pasar tenaga kerja. Dampak yang paling nyata adalah turunnya pendapatan riil, baik bagi pekerja informal (pendatang baru dalam pasar kerja) maupun bagi mereka yang berstatus karyawan. Penurunan pendapatan riil dapat disebabkan karena dampak langsung kenaikan harga barang dan jasa, atau bukan akibat penurunan pendapatan nominal. Hal ini mengkonfirmasi bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak selesai ketika seseorang sudah bekerja. Status sebagai pekerja tidak memberikan jaminan bahwa dia sejahtera, dan status sebagai penganggur tidak selalu berarti bahwa dia miskin. Implikasinya, menjadikan penganggur sebagai kelompok sasaran utama dalam program penanggulangan krisis merupakan langkah yang menyesatkan. Oleh karena itu kelompok yang paling memerlukan perhatian adalah yang sudah bekerja tetapi tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

b. Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada periode 2001-2006 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Gambar 2.1.). Pada periode 2001-2004 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 7,26 juta pada tahun menjadi 6,98 juta pada tahun 2004 (Hasil Estimasi SSN Kor). Jika dipersentasekan nampak terjadi penurunan dari 20,73% pada tahun 2001 menjadi 19,10% pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2005 dan 2006 (Hasil SSN Panel Maret 2005 - 2006), terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu menjadi 7,14 juta orang atau 19,95% (tahun 2005) dan 7,68 juta orang atau 21,09% (tahun 2006). Selanjutnya dengan adanya program aksi mengatasi dampak kenaikan

harga BBM (PAMDKB) pada tahun 2006 lalu secara berturut-turut, prosentase jumlah penduduk miskin terus menurun. Pada tahun 2007 menjadi sebesar 19,98%, tahun 2008 menjadi sebesar 18,51% dan tahun 2009 menjadi sebesar 16,68%.

Gambar 2.1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2001 – 2009



Sumber : Hasil PKIB 2001, PSE 2005, PPLS 2008 termasuk data tahun lainnya

c. **Pertumbuhan Ekonomi**

PDRB Jawa Timur atas dasar harga berlaku selama kurun waktu lima tahun terakhir (dapat dilihat pada Tabel 3.3) masing-masing Rp. 403,39 triliun (2005), Rp. 470,63 triliun (2006), Rp. 534,92 triliun (2007), Rp. 619,00 triliun (2008) dan Rp. 684,23 triliun. Dari angka-angka PDRB tersebut, nampak PDRB Jawa Timur tiap tahun terus mengalami peningkatan, sejalan dengan proses membaiknya kondisi ekonomi. Nilai PDRB yang dihasilkan masih mengandung pengaruh perubahan harga, sehingga angka ini belum bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 2000, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan dari perubahan jumlah nilai produk barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil).

PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada Tabel 2.4., menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama periode 2005-2009 adalah berturut-turut sebesar 5,84% (2005); 5,80% (2006); 6,11% (2007); 5,94% (2008); 5,01% (2009).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 5,84%, selanjutnya sejalan dengan kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005 sebagai dampak pengurangan subsidi BBM, pertumbuhan ekonomi melambat di tahun 2006 yaitu menjadi sebesar 5,80%, disamping akibat dari efek

Tabel 2.4.

multiplier kenaikan BBM, melambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2006 juga diakibatkan oleh naiknya cukai rokok.

Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2005 – 2009

Keterangan		2005	2006	2007	2008 ^{*)}	2009 ^{**)}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	403.392	470.627	534.919	619.004	684.231
2.	PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	256.375	271.249	287.814	304.923	320.211
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84	5,80	6,11	5,94	5,01

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi kembali menggeliat, hingga mampu tumbuh 6,11% lebih tinggi dibanding data dua tahun sebelumnya. Tetapi kondisi itu tidak bertahan lama, karena pada akhir tahun 2007 hingga kuartal kedua tahun 2008, kenaikan harga minyak dunia meningkat hingga mencapai 147 dollar AS per barrel. Secara perlahan, kenaikan itu juga berdampak pada kenaikan harga BBM di dalam negeri yang pada akhirnya mendorong naiknya harga barang dan jasa. Kondisi ini terus berlanjut dengan terjadinya krisis finansial yang dimulai dari kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat, hingga meluas di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Bagi efek domino, Jawa Timur juga terkena imbas, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 melambat kembali dan hanya mencapai 5,94%. Dampak Krisis Keuangan Global yang terjadi pada akhir tahun 2008 terus berlanjut hingga tahun 2009, ekspor beberapa komoditi unggulan Jawa Timur khususnya ke negara-negara Amerika dan Eropa ikut merosot, dan berakibat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009 terus melambat dengan hanya tumbuh sebesar 5,01%.

• **Pertumbuhan Sektoral**

Kenaikan harga BBM yang terjadi 2 kali dalam tahun 2005 masih mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada angka 5,84%. Beberapa sektor ekonomi yang masih mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2005 adalah sektor Pertambangan dan penggalian, sektor Perdagangan, hotel, dan restoran, sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor Listrik, gas, dan air bersih, yang masing-masing tumbuh 9,32%, 9,15%, 7,49%, dan 6,18%. Sementara itu sektor lainnya rata-rata tumbuh di bawah 5%.

kenaikan

Selanjutnya pada tahun 2006 perekonomian Jawa Timur nampak sedikit melambat dengan hanya tumbuh sebesar 5,80%. Dampak kenaikan BBM yang terjadi selama tahun 2005 mulai dirasakan oleh beberapa sektor produksi, seperti sektor Industri dan sektor Konstruksi yang hanya tumbuh sebesar 3,05% dan 1,42%. Sektor lainnya seperti sektor Pertambangan dan penggalian, sektor Listrik, gas, dan air bersih serta sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga nampak melambat dibanding tahun sebelumnya, dengan tumbuh masing-masing sebesar 8,58%, 4,07% dan 7,46%. Sektor yang masih mampu tumbuh tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 9,62%.

Tabel 2.5. Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005-2009 (%)

Sektor		2005	2006	2007	2008*)	2009**)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian	3,16	3,99	3,13	3,12	4,01
2.	Pertambangan & Penggalian	9,32	8,58	10,44	9,36	7,06
3.	Industri Pengolahan	4,61	3,05	4,64	4,36	2,62
4.	Listrik, Gas & Air bersih	6,18	4,07	11,81	3,11	2,58
5.	Konstruksi	3,48	1,42	1,21	2,71	4,25
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	9,15	9,62	8,39	8,19	5,70
7.	Pengangkutan & Komunikasi	5,00	6,77	7,77	8,38	12,14
8.	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	7,49	7,46	8,47	8,05	5,68
9.	Jasa-jasa	4,23	5,27	5,88	6,32	6,65
PDRB		5,84	5,80	6,11	5,94	5,01

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Pengaruh kenaikan harga BBM pada tahun 2005 mulai berkurang pada tahun 2007, sehingga tahun 2007 perekonomian Jawa Timur nampak meningkat dengan tumbuh sebesar 6,11%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi pada tahun 2007 adalah sektor Listrik, gas, dan air bersih, sektor Pertambangan dan penggalian, sektor Perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 11,81%, 10,44%, 8,39% dan 8,47%. Sedangkan sektor Industri pengolahan yang masih menjadi penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Jawa Timur hanya mampu tumbuh 4,64%.

Krisis Keuangan Global yang terjadi pada semester II tahun 2008 berpengaruh pada perekonomian Jawa Timur tahun 2008, sehingga

mengalami perlambatan kembali yaitu tumbuh sebesar 5,94%. Tercatat beberapa sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor Industri pengolahan, sektor Listrik, gas dan air bersih, sektor Konstruksi, dan sektor Pertanian masing-masing tumbuh sebesar 4,36%, 3,11%, 2,71% dan 3,12%. Sektor-sektor yang masih mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor Pertambangan dan penggalian, sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor Pengangkutan dan komunikasi, dan sektor Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan masing-masing tumbuh sebesar 9,36%, 8,19%, 8,38%, dan 8,05%.

Dampak Krisis Keuangan Global yang terjadi pada tahun 2008 berlanjut hingga tahun 2009, dampak yang terasa adalah ekspor ke luar negeri menurun tajam, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur jadi ikut melambat. Tercatat pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya sebesar 5,01%. Beberapa sektor yang masih mengalami pertumbuhan tinggi adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-jasa masing-masing tumbuh sebesar 12,14%, 7,06%, 5,68% dan 6,65%. Sektor-sektor andalan Jawa Timur seperti Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian masing-masing hanya tumbuh sebesar 5,70%, 2,62% dan 4,01%. Sementara sektor lainnya rata-rata masih tumbuh pada level 2 sampai 4%.

- ***Distribusi PDRB Menurut Penggunaan***

Pengukuran PDRB menurut penggunaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengukuran PDRB menurut lapangan usaha/sektoral, yang disajikan dalam satu kerangka kerja. Meskipun demikian, penghitungan PDRB menurut penggunaan dilakukan secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. Jika pembahasan PDRB sektoral lebih menitik beratkan pada proses produksi serta faktor pendapatan yang diturunkan (balas jasa faktor produksi), sedangkan PDRB menurut penggunaan menjelaskan tentang penggunaan atas pendapatan tersebut. Selain itu, melalui komponen penggunaan atau permintaan akhir (*final demand*) juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa domestik.

Perkembangan struktur ekonomi di Jawa Timur akibat dari proses pembangunan ekonomi yang terjadi selama kurun waktu tersebut tidaklah terlepas dari pertumbuhan mau tersebut

perilaku yang terjadi di masing-masing komponen penggunaan akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang, sebagian besar produk barang dan jasa yang beredar di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Tabel 2.6. menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun seluruh nilai tambah yang dihasilkan ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, dengan kata lain bahwa dari produk domestik yang dihasilkan sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Pada tahun 2009 konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 67,75% dari seluruh pengeluaran di Jawa Timur, atau sekitar Rp. 463,59 triliun yang terdiri atas Rp. 270,22 triliun untuk konsumsi makanan dan Rp. 193,37 triliun untuk konsumsi non makanan. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya angka ini nampak lebih tinggi. Pada tahun 2008 persentase konsumsi rumah tangga sebesar 66,05% atau sekitar Rp. 408,88 triliun yang terdiri atas Rp. 242,40 triliun untuk konsumsi makanan dan Rp. 166,47 triliun untuk non makanan.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik karena dikonsumsi oleh pihak negara lain maupun dari propinsi lain. Secara total, nilai ekspor menunjukkan peningkatan sejalan dengan semakin bertambahnya permintaan pasar luar negeri terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Jawa Timur, sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.6. Pada tahun 2009 kontribusinya mencapai 46,41% atau sekitar Rp. 317,54 triliun, sedangkan pada tahun 2008 kontribusinya sebesar 44,42% atau Rp. 274,94 triliun.

Berbeda dengan transaksi ekspor, impor menjelaskan tentang adanya tambahan penyediaan produk (supply) di wilayah ekonomi domestik. Impor juga terdiri dari produk barang dan jasa. Tidak berbeda jauh dengan ekspor, impor barang dan jasa juga berasal dari produk luar negeri maupun provinsi lain. Impor bukan merupakan produk yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi domestik, oleh karena itu impor harus dikeluarkan dari perhitungan PDRB. Dengan demikian, maka PDRB akan menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh Jawa Timur. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Jawa menunjukkan

produk negara dan provinsi lain. Pada tahun 2009 kontribusi impor mencapai 41,85% atau sekitar Rp. 286,33 triliun, sedangkan pada tahun 2008 sebesar 39,53% atau Rp. 244,68 triliun. Tingginya peran ekspor dan impor dalam perekonomian Jawa Timur dimungkinkan karena Provinsi Jawa Timur merupakan pusat industri dan perdagangan di kawasan wilayah Indonesia Timur.

Tabel 2.6. Distribusi PDRB Jawa Timur Menurut Penggunaan ADHB dan ADHK 2000 Tahun 2005 - 2009 (%)

No.	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. Atas Dasar Harga Berlaku						
1.0	Konsumsi Rumah tangga	66.02	66.89	67.64	66.05	67.75
	- Makanan	38.05	39.85	40.09	39.16	39.49
	- Non Makanan	27.97	27.03	27.54	26.89	28.26
2.0	Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	0.74	0.72	0.69	0.64	0.63
3.0	Konsumsi Pemerintah	6.69	7.21	7.32	7.47	7.88
4.0	Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.66	18.22	17.68	17.85	17.92
5.0	Perubahan Stok	9.19	4.54	2.71	3.09	1.25
6.0	Ekspor	45.60	44.89	44.81	44.42	46.41
	a. Antar Negara/Luar Negeri	19.70	19.96	19.68	19.93	21.12
	b. Antar Provinsi	25.89	24.94	25.13	24.49	25.28
7.0	Impor	45.91	42.47	40.84	39.53	41.85
	a. Antar Negara/Luar Negeri	21.15	19.06	17.76	17.39	17.84
	b. Antar Provinsi	24.76	23.40	23.08	22.13	24.01
8.0	Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
II. Atas Dasar Harga Konstan 2000						
1.0	Konsumsi Rumah tangga	69.61	70.49	70.62	69.74	71.62
	- Makanan	39.62	40.75	40.03	39.35	39.80
	- Non Makanan	29.99	29.73	30.59	30.40	31.82
2.0	Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	0.67	0.67	0.67	0.64	0.64
3.0	Konsumsi Pemerintah	6.19	6.35	6.48	6.83	7.31
4.0	Pembentukan Modal Tetap Bruto	18.30	18.55	17.95	17.94	17.98
5.0	Perubahan Stok	4.90	2.40	2.61	2.10	- 0.41
6.0	Ekspor	49.06	50.46	50.24	50.20	52.22
	a. Antar Negara/Luar Negeri	20.42	21.68	21.79	22.44	23.14
	b. Antar Provinsi	28.64	28.78	28.45	27.75	29.07
7.0	Impor	48.72	48.92	48.56	47.45	49.35
	a. Antar Negara/Luar Negeri	22.33	21.60	20.85	20.59	20.93
	b. Antar Provinsi	26.39	27.32	27.71	26.86	28.42
8.0	Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

d. Indeks Disparitas Wilayah

d. Indeks

Output daerah yang merupakan representasi dari kekayaan daerah dan kesejahteraan masyarakat adalah dua hal yang berbeda, pertanyaanya apakah ada kaitan antara kekayaan daerah (*regional prosperity*) dan kesejahteraan masyarakat (*community welfare*) di suatu daerah. Asumsi bahwa tingkat kekayaan daerah yang tinggi juga akan berdampak terhadap tingginya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut memerlukan gambaran kondisi disparitas regional. Rendahnya ketimpangan regional dalam hal kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari kebijakan pemerataan pembangunan antar daerah (*equalization policy*) yang dijalankan pemerintah, terutama melalui instrumen fiskal (*fiscal policy*) seperti transfer dari pusat, transfer antar daerah dan kebijakan lain.

Tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di suatu wilayah umumnya berfluktuasi seiring dengan tingkat perubahan PDRB per kapitanya. Melebar atau menyempitnya kesenjangan itu juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat, selain itu juga sangat dipengaruhi oleh kreatifitas Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan output daerah. Kondisi tersebut tergambarkan pada indeks Williamson (baca : Indeks Kesenjangan) dengan PDRB per kapita sebagai tolok ukur penghitungan.

Tabel 2.7.
Koefisien Varians Williamson PDRB
Per Kapita Jawa Timur
Tahun 2005-2009

Tahun	Indeks Vw	Perubahan
(1)	(2)	(3)
2005	116,57	1,50644
2006	116,31	-0,22304
2007	115,71	-0,51586
2008*)	115,96	0,21606
2009**)	116,02	0,05174

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Timur yang ditunjukkan dengan Indeks Disparitas Williamson dalam periode tahun 2005 – 2009 mengalami kemajuan yang signifikan dengan indeks yang cenderung menurun (Tabel 2.7.). Tercatat bahwa indeks pada tahun 2005 sebesar 116,57. Dari kolom (3) Tabel 2.7. diketahui bahwa indeks kesenjangan tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,51% dibanding

dengan tahun 2004. Diduga karena semakin melebarnya kesenjangan pada tahun 2005 karena dampak kenaikan harga BBM yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi secara nasional maupun Jawa Timur. Sebagai akibat tingginya laju inflasi yang terjadi selama tahun 2005 berdampak semakin menurunnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum, yang pada akhirnya semakin melebarnya kesenjangan antar wilayah. Namun kondisi tersebut tidak berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dan kesenjangan semakin menyempit. Pada tahun 2006 nilainya sebesar 116,31 atau terjadi penurunan sebesar 0,22%, indeks pada tahun 2007 sebesar 115,71 atau mengalami penurunan sebesar 0,52%.

Adanya kenaikan harga BBM mulai 24 Mei 2008 serta terjadi krisis global menyebabkan melebarnya tingkat kesenjangan di Jawa Timur, yaitu ditunjukkan dengan naiknya nilai indeks Disparitas Williamson sebesar 115,96 atau mengalami kenaikan sebesar 0,22% dibanding tahun 2007. Kenaikan harga BBM 2008 tidak berlangsung lama, karena pada akhir tahun 2008 harga BBM kembali menurun secara bertahap sehingga belum berdampak menyempitnya kesenjangan di Jawa Timur pada tahun 2009. Pada tahun 2009 indeks sebesar 116,01, masih terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,05% dibanding dengan data tahun 2008.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka IPM yang dihasilkan dalam analisis ini bertujuan untuk melihat keterbandingan/posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penghitungan IPM Jawa Timur dalam analisis ini memakai standar harga Jakarta Selatan. Oleh karena itu angka IPM menurut kabupaten/kota yang dihasilkan dari penyusunan laporan IPM ini dapat dibandingkan dengan kabupaten/kota dan provinsi lain.

Secara umum angka IPM di Jawa Timur selama periode 2004 - 2009 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2005 nilainya 68,42, dan selanjutnya meningkat masing-masing 69,18 (2006); 69,78 (2007); 70,38 (2008); dan 70,98 (2009). Dari hasil penghitungan IPM tahun 2009, diperoleh gambaran bahwa 19 Kabupaten/Kota mempunyai IPM lebih baik daripada IPM Jawa Timur, sedangkan 19 kabupaten lainnya memiliki nilai IPM di bawah angka IPM Jawa Timur. Nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Blitar sebesar 77,12 sedangkan urutan kedua ditempati Kota Surabaya dengan nilai IPM 76,70 dan urutan ketiga adalah Kota Malang sebesar 76,58. Urutan terendah IPM adalah Kabupaten Sampang dan Urutan

angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang hanya sebesar 57,66.

Secara garis besar, nilai IPM di tiap kabupaten/kota mengalami kenaikan dari angka tahun 2005 hingga 2009 walaupun tidak menunjukkan kenaikan yang drastis. Hal ini dikarenakan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun Kabupaten/kota untuk meningkatkan angka IPM, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut.

Tabel 2.8. Perkembangan Angka IPM Selama Tahun 2005-2009 di Jawa Timur

No.	Tahun	IPM	Angka IPM Tertinggi	Angka IPM Terendah	Jlm. Kab. dengan IPM di bawah rata-rata Jatim	Jlm. Kab. dengan IPM di atas rata-rata Jatim
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2005	68,42	75,10	54,98	20	18
2	2006	69,18	75,58	56,27	19	19
3	2007*	69,78	75,88	56,99	19	19
4	2008**	70,38	76,60	57,66	19	19
5	2009***	70,98	77,12	58,23	19	19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Hasil Pengolahan
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Komponen-komponen yang dapat menunjang IPM tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut :

• **Indeks Kesehatan**

Untuk indeks kesehatan, angka tertinggi dicapai oleh Kota Blitar yaitu sebesar **77,77** dan angka terendah sebesar 59,35 dicapai oleh Kabupaten Probolinggo. Terdapat 17 kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM dan indeks kesehatan yang lebih tinggi dari angka Jawa Timur. Hanya 2 kabupaten yang memiliki nilai IPM rendah dan Indeks Kesehatan tinggi yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Ngawi.

Selanjutnya terdapat 17 kabupaten yang memiliki nilai IPM dan indeks kesehatan yang lebih rendah daripada angka Jawa Timur, termasuk di dalamnya sebagian daerah tapal kuda, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IPM tinggi dan Indeks Kesehatan rendah yaitu Kota Pasuruan dan Kota Batu.

Dalam usaha meningkatkan nilai indeks kesehatan sebagai penunjang naiknya angka IPM, maka pemerintah harus mengarahkan perhatian pada daerah yang masih memiliki indeks ke perhatian

yaitu dengan pembangunan sarana kesehatan yang memadai. Selain itu masyarakat yang berada di daerah tersebut sangat membutuhkan adanya pembinaan terhadap pola pikir mereka tentang pentingnya pemanfaatan sarana kesehatan secara optimal.

Sementara itu, dalam penghitungan IPM pada Indeks Kesehatan penduduk dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup. Peningkatan angka harapan hidup akan bisa dicapai apabila ada upaya untuk meminimalkan angka kematian bayi maupun kematian ibu melahirkan. Beberapa faktor yang cukup sensitif terhadap perubahan angka kematian bayi dan ibu adalah pola makanan yang bergizi dan penolong kelahiran/persalinan. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari berbagai pihak.

- ***Indeks Kesehatan***

Dari penghitungan indeks pendidikan diperoleh bahwa Indeks Pendidikan tertinggi dicapai Kota Malang sedangkan nilai terendah dicapai Kabupaten Sampang dengan nilai masing-masing sebesar 88,87 dan 52,01. Berdasarkan data dari BPS bahwa terdapat 19 kabupaten/Kota yang memiliki nilai IPM tinggi dan Indeks Kesehatan tinggi dibanding dengan nilai Jawa Timur, yang mencakup seluruh wilayah kota, sementara hanya 1 (satu) kabupaten yang mempunyai nilai IPM lebih rendah dengan Indeks Kesehatan yang lebih tinggi dibanding dengan nilai Jawa Timur yaitu Kabupaten Nganjuk, dan sisanya sebanyak 18 Kabupaten memiliki capaian nilai IPM dan Indeks Pendidikan lebih rendah dari nilai Jawa Timur yang sebagian besar merupakan daerah tapal kuda.

Dari data hasil penghitungan Indeks kesehatan dan Indeks pendidikan, dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah dengan Indeks Kesehatan rendah juga merupakan daerah yang memiliki Indeks Pendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan teori yang ada yaitu semakin rendah Indeks (tingkat) Pendidikan yang dimiliki maka Indeks Kesehatan masyarakatpun juga semakin rendah.

Kondisi kesehatan dan pendidikan penduduk yang tinggal di sebagian besar wilayah tapal kuda relatif rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga komponen tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rendahnya angka status pembangunan manusia di wilayah tapal kuda. Rendahnya kedua variabel tersebut, diduga karena pengaruh kultur yang variabel

pada masyarakat di wilayah tersebut serta pengaruh akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang relatif masih sulit bagi masyarakat tapal kuda. Hal ini dapat diartikan bahwa usaha dalam meningkatkan IPM akan mengalami kesulitan jika dilihat dari segi kesehatan maupun pendidikan, karena kedua komponen tersebut berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang tidak mudah mengalami perubahan.

Lain halnya dengan kedua komponen yang sudah dijelaskan, komponen pendukung IPM yang ketiga adalah PPP (*Purchasing Power Parity*/daya beli). Diharapkan komponen ini akan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap IPM. Kontribusi yang besar dari angka PPP akan tercapai seiring dengan peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Namun demikian, kondisi yang diharapkan tersebut tampaknya juga sulit dicapai di sebagian besar wilayah di Jawa Timur. Karena dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi antara 5-6%, tingkat kesejahteraan penduduk masih berada dalam kondisi yang stagnan.

- **Indeks *Purchasing Power Parity* PPP**

Secara umum, nilai PPP di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami perbaikan meskipun mengalami beberapa kendala sebagai akibat adanya kenaikan harga BBM pada pertengahan tahun 2007 yang masih dirasakan di tahun 2008. Di beberapa daerah cukup mengalami kendala itu hingga mengalami perlambatan indeks PPP-nya.

2.2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya

Disamping lima indikator sebagaimana tersebut di atas, akan disampaikan pula beberapa hasil evaluasi terhadap indikator prioritas pembangunan lainnya yang dipandang penting sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diantaranya yaitu :

a. Kinerja Indikator Prioritas Pembangunan Ekonomi

- ***Angka Konsumsi RT Per Kapita Jawa Timur Tahun 2008-2009***

Berdasarkan data hasil Susenas 2008-2009 di Jawa Timur, terjadi peningkatan rata-rata konsumsi per kapita dari 370.958 ribu rupiah per kapita sebulan tahun 2008, menjadi Rp. 380.163 ribu per rupiah

kapita sebulan tahun 2009, atau terjadi peningkatan sebesar 2,48%. Namun demikian, perlu hati-hati dalam menafsirkan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita ini karena belum tentu menjadi gambaran peningkatan kesejahteraan. Peningkatan konsumsi dapat terjadi seiring dengan terjadinya peningkatan harga atau inflasi dan bukan karena pendapatan yang meningkat. Selain dengan membandingkan dengan tingkat inflasi, perilaku konsumsi juga terkait dengan besaran pendapatan seperti dijelaskan dalam Hukum Engel.

Karena periode pencacahan Susenas baik 2008 maupun 2009 adalah bulan Juli, maka tingkat inflasi yang digunakan adalah (*year on year*) Juli 2009, yang besarnya adalah 2,90%. Bila dibandingkan dengan kenaikan konsumsi, ternyata tingkat inflasi ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan rata-rata konsumsi 2008-2009. Sementara itu, terjadi kenaikan persentase konsumsi pada kelompok makanan dari 48,36% tahun 2008, menjadi 52,73% tahun 2009. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan tingkat inflasi dan perilaku konsumsi dalam Hukum Engel bahwa peningkatan rata-rata konsumsi per kapita 2008-2009 dikarenakan peningkatan harga yang disertai dengan penurunan kesejahteraan.

Pada wilayah dimana terjadi situasi penurunan tingkat kesejahteraan, maka pengamatan dilakukan menurut wilayah (desa atau kota). Karena dalam penghitungan inflasi hanya terbatas pada cerminan harga konsumen dan tidak dapat dipecah dalam wilayah perdesaan atau perkotaan, maka digunakan Hukum Engel untuk menjelaskan situasi ini. Selama tahun 2008 dan tahun 2009, persentase konsumsi makanan di wilayah perkotaan meningkat dari 44,42% menjadi 50,17% atau naik 12,94 poin. Untuk wilayah perdesaan juga mengalami peningkatan, dari 54,25% menjadi 59,19%, atau naik 9,10 poin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa situasi penurunan tingkat kesejahteraan ini terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan, terutama di wilayah perkotaan.

Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Rata-rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi dan Status Wilayah di Jawa Timur 2008-2009 (Rupiah per Bulan)

Tahun	Satus Wilayah	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	Kota	202.039	252.756	454.795
	Desa	157.743	133.004	290.747
	Kota + Desa	179.402	191.556	370.958
2009	Kota	219.238	217.742	436.980
	Desa	169.502	116.847	286.349
	Kota + Desa	200.478	179.685	380.163

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

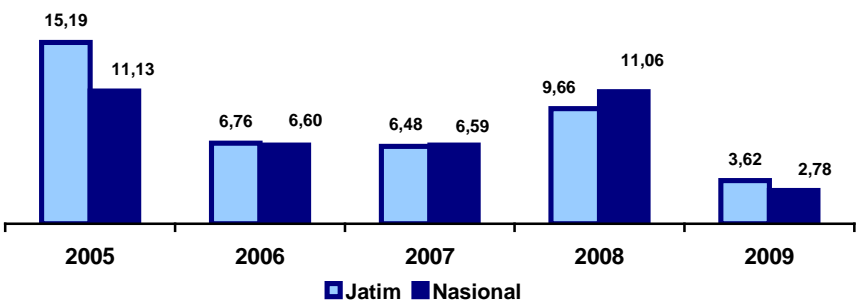
Berdasarkan besaran rata-rata konsumsi per kapita penduduk selama sebulan menurut kabupaten/kota tahun 2009, Kota Surabaya merupakan wilayah yang tertinggi, diikuti oleh seluruh Kota di Jawa Timur, dan hanya Kabupaten Sidoarjo (urutan ketiga), satu-satunya kabupaten yang berada di antara sepuluh besar tertinggi. Untuk rata-rata konsumsi per kapita terendah di Jawa Timur tahun 2009, adalah Kabupaten Pacitan, diikuti Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Lumajang (tiga wilayah terendah), namun demikian bukan berarti rata-rata konsumsi per kapita sebulan lebih tinggi atau rendah. Karena tingkat kemahalan antar wilayah sangat bervariasi, maka diperlukan pemahaman dalam menerjemahkan situasi ini. Cerminan perbedaan kemahalan wilayah biasanya tercermin dari beradanya wilayah-wilayah kota pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Kabupaten. Padahal secara umum memang wilayah kota memiliki tingkat kemahalan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten, kecuali Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, deviasi yang ada antar wilayah di Provinsi Jawa Timur diindikasikan cukup lebar, karena rata-rata konsumsi provinsi yang berada pada posisi moderat memisahkan 13 wilayah di atas dan 25 wilayah di bawah rata-rata konsumsi per kapita provinsi.

- **Laju Inflasi Jawa Timur Tahun 2005-2009**

Laju inflasi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir masih tergolong dalam katagori rendah, kecuali pada tahun 2005 masuk dalam katagori sedang akibat naiknya harga BBM pada tahun tersebut. Hal serupa hampir terjadi pada tahun 2008 dengan laju inflasi cukup tinggi yaitu 9,66% yang juga disebabkan oleh naiknya harga BBM seiring dengan tidak terkendalinya harga minyak dunia. Walaupun kenaikan BBM di tahun 2008 tersebut sempat dikoreksi di penghujung tahun

tahun, namun *multiplier effects* akibat kenaikan tersebut sudah terlanjur terjadi sehingga inflasi hampir menembus dua digit.

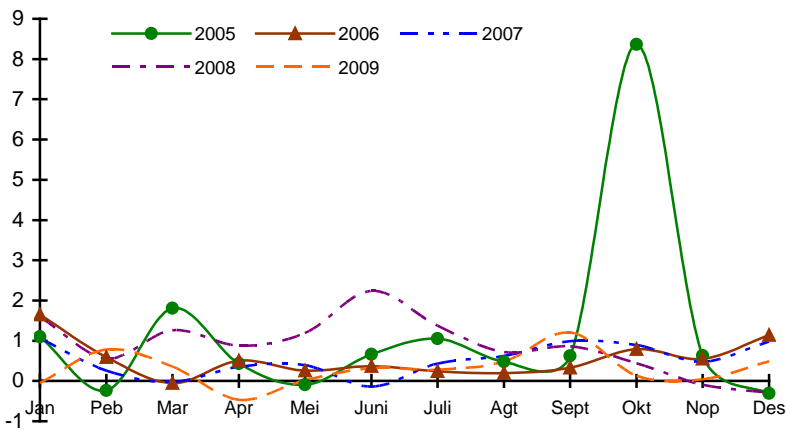
Gambar 2.2 Laju Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2005-2009



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Memasuki tahun 2009 sebenarnya sudah terlihat tanda-tanda akan rendahnya inflasi. Turunnya harga minyak dunia disikapi pemerintah dengan kembali menurunkan harga BBM dalam negeri di bulan Januari 2009 dan juga menurunkan tarif angkutan yang sempat naik di tahun 2008. Hal ini mengakibatkan pada bulan Januari 2009 Jawa Timur mengalami deflasi sebesar 0,05%. Terjadinya deflasi di bulan Januari 2009 ini tidak pernah terjadi pada lima tahun sebelumnya yang biasanya berpotensi inflasi tinggi akibat naiknya harga bahan makanan.

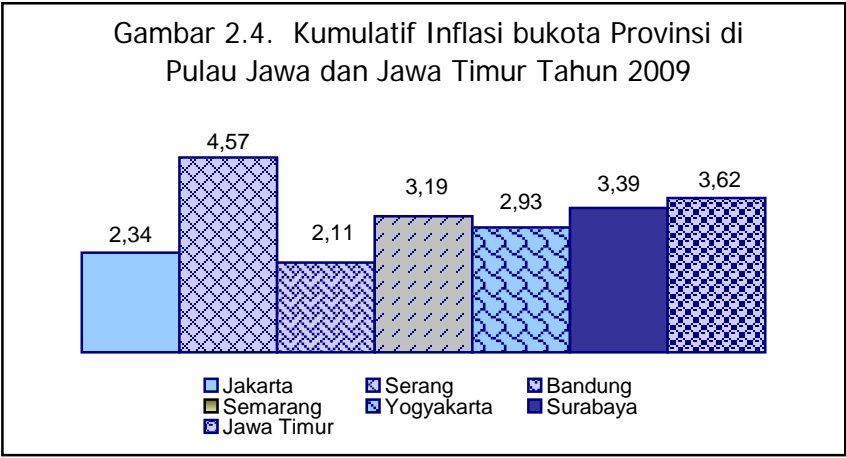
Gambar 2.3. Inflasi Bulanan Jawa Timur Tahun 2005-2009



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama dua tahun terakhir, inflasi Jawa Timur selalu lebih rendah dibanding inflasi nasional. Namun demikian, pada tahun 2009 kondisi sebaliknya terjadi. Inflasi Jawa Timur tahun 2009 sedikit lebih tinggi dibanding inflasi nasional. Hal ini disebabkan kota-kota besar di pulau Jawa cenderung memiliki inflasi yang lebih rendah dibanding inflasi Jawa

Jawa Timur sehingga berpengaruh besar terhadap inflasi nasional secara umum.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dilihat dari penyebabnya, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, laju inflasi Jawa Timur lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang terkait dengan harga seperti naiknya harga cukai rokok, naiknya harga premium dan solar, konversi energi yang berdampak naiknya harga minyak tanah, naiknya tarif air minum dan yang terakhir adalah naiknya harga elpiji. Kenaikan harga-harga tersebut membawa dampak naiknya harga komoditas lain seperti makanan jadi.

Disamping itu, laju inflasi empat tahun terakhir juga dipengaruhi oleh naiknya harga beberapa komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula pasir dan emas perhiasan yang belum dapat dikendalikan harganya oleh pemerintah serta biaya sekolah swasta yang terus mengalami kenaikan. Khusus di tahun 2009, lonjakan harga gula pasir dan emas perhiasan serta naiknya harga beras dan mobil merupakan pendorong utama terjadinya inflasi disamping naiknya harga bumbu-bumbuan seperti bawang putih dan cabe rawit.

• **PDRB per Kapita Jawa Timur Tahun 2005-2009**

PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini selalu menunjukkan peningkatan. Selanjutnya, jika besaran PDRB tersebut diberi penimbang dengan jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output (PDRB), maka terdapat angka PDRB perkapita.

Tabel 2.10.

Tabel 2.10. dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku berturut-turut menunjukkan peningkatan. Peningkatan PDRB per kapita disebabkan karena pertumbuhan PDRB ADHB yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2005 PDRB per kapita Jawa Timur sebesar Rp. 11,06 juta, selanjutnya pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp. 12,83 juta. meskipun tahun 2006 masih diwarnai oleh kenaikan harga BBM yang terjadi 2 kali selama tahun 2005, nampaknya PDRB perkapita masih meningkat tinggi. Di tahun berikutnya, kedinamisan ekonomi Jawa Timur mulai kembali menciptakan PDRB perkapita yang lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 14,50 juta (2007). Selanjutnya meskipun pada tahun 2008 gaung Krisis Keuangan Global sudah mulai mendunia, PDRB perkapita Jawa Timur masih terus meningkat yaitu menjadi sebesar Rp. 16,69 juta (2008) dan tahun 2009 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 18,35 juta.

Tabel 2.10. PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 - 2009

Uraian		2005	2006	2007	2008 ^{*)}	2009 ^{**)}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlak u (Miliar Rupiah)	403.392	470.627	534.919	619.004	684.231
2	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu jiwa)	36.482	36.691	36.896	37.095	37.286
3	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	11.057	12.827	14.498	16.687	18.351

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

• **Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Tahun 2005-2009**

Dari hasil penghitungan pemerataan pendapatan versi Bank Dunia pada periode 2005-2007 di Jawa Timur, ketimpangan pendapatan yang terjadi cenderung mengalami perbaikan. Artinya ketimpangan pendapatan lambat laun mengecil. Tahun 2005 penduduk yang mempunyai pendapatan berkategori 20% ke atas dapat menikmati kue ekonomi sebanyak 46,49% bergerak mengecil masing-masing 43,47% (2007), 43,22% (2008) dan 42,55% (2009). Sedangkan untuk yang berpendapatan 40% menengah dan 40% ke bawah semakin banyak yang dapat menikmati kue pembangunan. Dengan demikian

menurun

kesenjangan semakin menurun, dan semakin dirasakannya kue ekonomi di tingkat pendapatan yang lebih bawah.

Pada tahun 2005, penduduk yang berpendapatan 40% ke bawah semakin dapat menikmati hasil geliat ekonomi dari 18,88% menjadi 19,83% (2007), 19,92% (2008) dan 19,86 %

Tabel 2.11. Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur Tahun 2005 – 2009

Tahun	40 % bawah	40 % menengah	20 % atas
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	18,88	34,63	46,49
2007	19,83	36,70	43,47
2008	19,92	36,86	43,22
2009	19,86	37,59	42,55

Keterangan: Data tahun 2006 tidak tersedia
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

(2009). Menurut skala kesenjangan yang telah ditetapkan, karena penduduk yang berpendapatan 40% ke bawah menikmati hasil kegiatan ekonomi di atas nilai 17%, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi selama kurun waktu 2005 – 2009 itu berkategori ketimpangan pendapatan rendah.

• **Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Jatim Tahun 2004-2009**

Pada dasarnya kebutuhan manusia dibagi dalam dua kelompok, yaitu kebutuhan makanan dan non makanan. Kebutuhan makanan pada batas tertentu akan mencapai titik maksimal, sementara itu kebutuhan non makanan bisa dikatakan hampir tidak terbatas.

Dalam hukum Engel (Engel law) disebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk makanan semakin menurun, sedangkan pengeluaran untuk non makanan akan terjadi sebaliknya yaitu proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel 2.12. Persentase Pengeluaran Rumahtangga Dirinci Menurut Pengeluaran Makanan & Non Makanan Jawa Timur Tahun 2005 – 2009

Tahun	Persentase		
	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	53.68	46.32	100.00
2006	54.03	45.97	100.00
2007	56.17	43.83	100.00
2008	48.36	51.64	100.00
2009	52.73	47.27	100.00

Sumber : Hasil Susenas 2004-2009 (diolah)

Pada tabel di atas terlihat pada tahun 2009 proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan sebesar 47,27%, lebih rendah 4% dibanding tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa persen penduduk Jawa Timur semakin menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun secara umum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa pengeluaran penduduk Jawa Timur untuk kebutuhan non makanan dari tahun ke tahun proporsinya relatif statis yaitu sekitar 45%, sedangkan proporsi kebutuhan makanan ± 55%. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa meskipun secara umum tingkat pendapatan semakin meningkat, namun pada kenyataannya belum mampu meningkatkan derajat kesejahteraan penduduk. Hal ini mungkin dikarenakan makin tingginya perubahan harga yang tidak sebanding dengan perkembangan pendapatan. Kondisi ini tercermin dari pola konsumsi penduduk yaitu lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

• **Indeks Gini Ratio Tahun 2004-2009**

Berdasarkan nilai gini ratio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2008-2009 masuk dalam kategori rendah (kurang dari 0,36). Nilai gini ratio tahun 2009 sebesar 0,29, lebih baik dibandingkan tahun 2008 yang nilainya 0,30, turun 0,01 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata konsumsi per kapita berada di bawah tingkat kenaikan harga (Inflasi) dan menyebabkan terjadinya pergeseran konsumsi kembali condong ke makanan, namun situasi ini justru menurunkan ketimpangan dalam distribusi konsumsi. Pergeseran tersebut terjadi karena berkurangnya share di kuintil 5, sedangkan kuintil 3 dan 4 mengalami peningkatan. Sementara pada kuintil bawah, kuintil 1 mengalami peningkatan, sedangkan kuintil 2 mengalami penurunan share.

Tabel 2.13. Persentase Total Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan menurut Status Wilayah dan Kuintil Penduduk di Jawa Timur 2008-2009

Tahun/ Wilayah (Kota/Desa)		Kuintil Penduduk berdasarkan Konsumsi					Gini Ratio
(1)	(2)	1	2	3	4	5	(8)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2008	Kota	7,98	12,13	15,76	21,46	42,68	0,31
	Desa	9,38	14,20	17,99	21,65	36,78	0,25
	Kota+Desa	8,18	12,73	15,94	21,04	42,13	0,30
2009	Kota	8,78	12,44	15,99	21,24	41,55	0,30
	Desa	10,88	14,42	17,38	21,45	35,87	0,23

Kota+Desa	9,09	12,55	15,95	21,13	41,28	0,29
-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

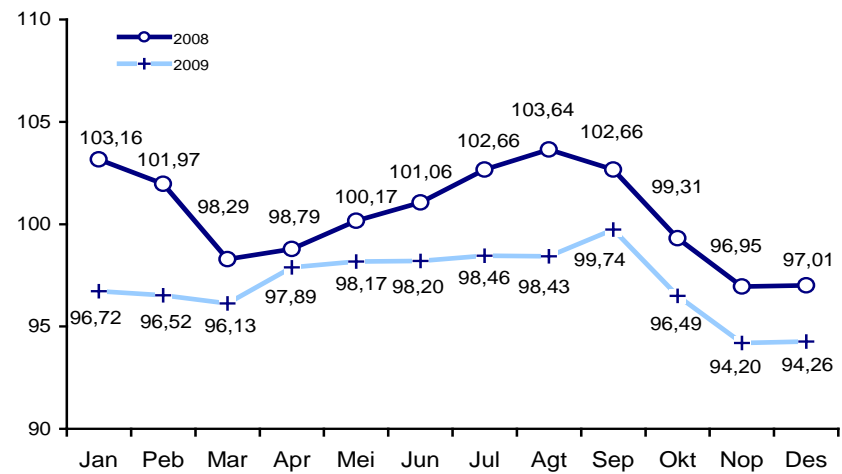
Terjadinya penurunan ketimpangan selama Terjadinya terutama terjadi di wilayah pedesaan, yang turun sebesar 0,02 poin, sedangkan penurunan di wilayah perkotaan hanya sebesar 0,01 poin. Walaupun nilai gini ratio pada wilayah perkotaan dan pedesaan masuk dalam ketimpangan rendah, namun terdapat perbedaan sebesar 0,07 poin antara wilayah perkotaan dan pedesaan di tahun 2009. Perbedaan ini semakin meningkat dibandingkan tahun 2008, yang memiliki perbedaan sebesar 0,06 poin. Ini menjadi indikasi bahwa wilayah pedesaan memiliki kecenderungan lebih cepat menuju tingkat pemerataan sempurna.

Pola perubahan share konsumsi antar kuintil berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada wilayah perkotaan terjadi pergeseran kuintil 4 dan 5, menuju kuintil di bawahnya. Di wilayah pedesaan terdapat kecenderungan kuintil 1 dan 2 semakin mendekati share kuintil 3, dan juga terjadi penurunan share pada kuintil 4 dan 5. Situasi ini yang mengindikasikan pemerataan di pedesaan akan lebih cepat dibandingkan perkotaan.

• **Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Tahun 2009**

Rata-rata NTP Jawa Timur tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 3,36% dibanding data tahun 2008 yaitu dari 100,79 menjadi 97,10. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima petani (4,15%) lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (8,11%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesejahteraan petani tahun 2009, secara umum masih lebih rendah dibanding kondisi tahun 2008.

Gambar 2.5. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur
Periode Tahun 2008 - 2009 (2007 = 100)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.5. menunjukkan bahwa selama tahun 2009, NTP Jawa Timur umumnya lebih rendah dibanding dengan bulan Gambar 2.5. 2008. Jika dilihat besarnya perubahan, kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 1,83% karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 1,15% sedangkan indeks harga yang dibayar petani turun sebesar 0,67%. Penurunan NTP tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 3,26% karena indeks yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 2,39% sedangkan indeks yang dibayar petani naik 0,89%.

Tabel 2.14. Rata-rata Indeks Diterima Petani (*I_t*), Indeks Dibayar Petani (*I_b*) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Tahun 2007 – 2009 (2007 = 100)

No.	Uraian	Tahun		
		2007	2008	2009*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks harga diterima petani (<i>I_t</i>)	100,00	112,94	117,63
2	Indeks harga dibayar petani (<i>I_b</i>)	100,00	112,06	121,15
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,00	100,79	97,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : * Angka Sementara

Jika dilihat NTP masing-masing subsektor pada tahun 2009, NTP tertinggi adalah subsektor Peternakan sebesar 107,39 sedangkan terendah sub sektor Tanaman pangan sebesar 91,03. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada sub sektor Tanaman hortikutura sebesar 6,44% dari 98,83 menjadi 105,19 sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada sub sektor Tanaman perkebunan rakyat sebesar 10,57% dari 110,93 menjadi 99,20.

Tabel 2.15. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Tahun 2007 – 2009 (2007 = 100)

No.	Uraian	Tahun		
		2007	2008	2009*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NTP Jawa Timur	100,00	100,79	97,10
2	NTP Tanaman Pangan	100,00	95,50	91,03
3	NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	100,00	110,93	99,20
4	NTP Peternakan	100,00	100,93	107,39
5	NTP Perikanan	100,00	102,18	100,76
6	NTP Tanaman Hortikultura	100,00	98,83	105,19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : * Angka Sementara

Indeks

- **Indeks Diterima Petani**

Rata-rata indeks harga yang diterima petani pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 4,15% dari 112,94 pada tahun 2008 menjadi 117,63. Kenaikan indeks disebabkan oleh naiknya indeks pada subsektor Peternakan sebesar 16,07% dari 112,48 menjadi 130,55, perikanan 4,94% dari 113,02 menjadi 118,60 dan tanaman hortikultura 15,10% dari 110,58 menjadi 127,28.

Tabel 2.16 Rata-rata Indeks Harga Diterima Petani Jawa Timur Menurut Subsektor Pertanian Tahun 2007 – 2009 (2007 = 100)

No.	Uraian	Tahun		
		2007	2008	2009*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks harga diterima petani (It)	100,00	112,94	117,63
2	Tanaman Bahan Makanan	100,00	111,84	110,59
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	100,00	124,81	120,29
4	Peternakan	100,00	112,48	130,55
5	Perikanan	100,00	113,02	118,60
6	Tanaman Hortikultura	100,00	110,58	127,28

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : * Angka Sementara

- **Indeks Dibayar Petani**

Rata-rata Indeks harga yang dibayar petani tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 8,11% dibanding indeks tahun 2008 yaitu dari 112,06 menjadi 121,15. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya indeks kelompok konsumsi rumahtangga serta indeks biaya produksi dan pembentukan modal.

Rata-rata indeks Konsumsi rumahtangga mengalami kenaikan sebesar 8,35% dari 112,40 pada tahun 2008 menjadi 121,78 pada tahun 2009. Kenaikan indeks kelompok ini terutama disebabkan naiknya indeks harga sub kelompok makanan jadi sebesar 11,85%, pendidikan 10,62%, pakaian 10,37%, bahan makanan 8,25% dan kesehatan 7,21%.

Indeks biaya produksi mengalami kenaikan sebesar 7,46% dari 110,65 pada tahun 2008 menjadi 118,91 pada tahun 2009. Kenaikan indeks ini terutama disebabkan oleh kenaikan indeks harga

Nilai

bibit sebesar 12,78%, barang modal 8,58% serta sewa, pajak dan lainnya 7,56%.

- ***Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur Tahun 2009***

Nilai Tukar Nelayan selama tahun 2009 berada pada level di atas 100, ini menunjukkan bahwa perkembangan harga ikan segar yang dihasilkan nelayan masih lebih tinggi dari pada perkembangan harga kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya produksi. Seharusnya dengan tingkat perkembangan harga ikan yang lebih baik dari pada harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga nelayan, dapat memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraannya, namun biasanya harga ikan yang tinggi cenderung berkaitan dengan tingkat produksinya yang rendah. Kendala cuaca biasanya merupakan faktor kunci nelayan tak bisa melaut pada bulan-bulan tertentu, sehingga nelayan masih belum mampu menghasilkan ikan segar dengan kuantitas yang stabil. Hal ini disebabkan sebagian besar nelayan masih bersifat tradisional dengan peralatan tangkap yang sangat sederhana.

Perkembangan harga yang diterima nelayan lebih tinggi dari pada perkembangan harga yang dibayar nelayan atau dengan kata lain perkembangan harga ikan segar yang dihasilkan nelayan masih cenderung lebih tinggi dari pada perkembangan harga kebutuhan hidup sehari-hari. Secara teori, dengan perkembangan harga yang tinggi, maka diharapkan nelayan dapat meraup lebih banyak pendapatan. Namun yang terjadi adalah perkembangan harga yang sangat tinggi hanya dinikmati oleh sebagian kecil nelayan saja terutama yang memiliki armada dan alat penangkapan yang lebih baik dan lebih modern. Namun bagi nelayan tradisional, kenaikan harga tidak bisa mereka nikmati karena terbatasnya kapasitas barang modal mereka yang rentan terhadap pengaruh cuaca.

Perkembangan NTN selama tahun 2009 cenderung stabil dibandingkan dengan perkembangannya tahun 2008. Kenaikan NTN tahun 2009 disinyalir karena pengaruh kondisi cuaca yang lebih buruk selama setahun penuh dibandingkan dengan kondisi cuaca di tahun 2008.

Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, terjadi kenaikan perkembangan indeks NTN. Kenaikan indeks ini terpengaruh oleh naiknya indeks harga yang diterima nelayan, sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan justru cenderung stabil. Hal ini masih

terpengaruh oleh kondisi cuaca yang tidak menentu, musim penghujan dan musim angin yang panjang menyebabkan banyak nelayan yang jarang melaut, sehingga kelangkaan ikan di pasaran mengakibatkan mahalnya harga ikan.

Perbedaan situasi dan kondisi perekonomian yang berbeda jauh selama periode satu tahun menjadi penyebab yang lain dari tingginya indeks harga yang diterima oleh nelayan. Kenaikan yang tinggi dari indeks harga yang diterima nelayan tersebut tidak langsung menjadikan kesejahteraan nelayan menjadi lebih baik. Kondisi ini hanya sebagai dampak dari tingginya harga-harga yang harus dikeluarkan oleh nelayan selama melaut.

Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Jawa Timur di Bulan Juli 2009 mengalami kenaikan dibandingkan pada periode sebelumnya yang mengalami penurunan. Dengan nilai perubahan sebesar 0,24% disebabkan karena perubahan indeks harga yang diterima nelayan (It) lebih tinggi dari pada perubahan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Indeks harga yang diterima nelayan naik dari 183,06 menjadi 185,60 dan indeks harga yang dibayar nelayan naik dari 121.65 menjadi 123.04, jika dipersentasekan maka masing-masing indeks naik sebesar 1,39% (It) dan 1,14% (Ib).

Kesejahteraan nelayan akan semakin turun bila nilai NTN mengalami penurunan, apalagi pada tahun 2009 cuaca buruk selalu terjadi. Menjadikan nelayan mengalami hambatan untuk melaut. Di tahun mendatang kesejahteraan nelayan juga masih belum memiliki prospek yang bagus bila dikaitkan dengan 2 macam krisis yang pasti terjadi, yaitu faktor cuaca ekstrim sebagai dampak dari pemanasan global dan krisis sumber daya perikanan sebagai akibat rusaknya terumbu karang dan migrasi ikan yang berlebihan keluar daerah tangkapan. Selain itu faktor penyebab internal juga menjadikan posisi nelayan lokal semakin lemah, yaitu rendahnya tingkat teknologi penangkapan, kecilnya skala usaha, belum efisiennya sistem pemasaran hasil ikan dan status nelayan yang sebagian besar adalah buruh. Jika demikian, diperlukan strategi kebijakan pembangunan yang efektif, yang mengacu pada sistem Agrobisnis yang komprehensif dan terpadu.

Potensi perikanan tangkap di Jawa Timur amatlah besar, karena sebagian besar wilayahnya mulai ujung barat hingga ujung timur berbatasan dengan laut. Pengelolaan agrobisnis perikanan perlu ditingkatkan dari hulu hingga hilir. Misi pemerintahan Provinsi Jawa

Timur yang “Pro Job” sebagian akan terwujud melalui pengelolaan agrobisnis terpadu pada sektor perikanan, misalnya pengawetan ikan, pengolahan tepung ikan, pengolahan produk hasil-hasil dari perikanan lainnya. Aksi pemerintah meluncurkan program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) terpadu perlu mendapat dukungan pemerintah daerah dan bukan hanya sektor tanaman pangan saja, tetapi perlu dikembangkan hingga mencapai kampung nelayan. Pengawasan terhadap program tersebut perlu dilakukan, sehingga mampu mendongkrak kegiatan ekonomi di kampung nelayan, yang pada akhirnya mampu menggerakkan roda ekonomi kampung nelayan yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Namun demikian bila diamati perkembangan NTN setiap bulannya masih fluktuatif sepanjang tahun, dan sangat dipengaruhi oleh musim/cuaca, ini memberikan indikasi belum intensifnya pengelolaan pasca panen produk perikanan, karena harga ikan justru lebih murah ketika musim panen tiba. Pengembangan agrobisnis perikanan masih sangat diperlukan, demi terjaganya stabilitas harga ikan. Selain itu peningkatan kualitas hasil tangkapan juga perlu mendapat perhatian, sehingga ikan masih dalam keadaan segar dan utuh ketika sampai ditangan konsumen.

• **Perkembangan ICOR Jawa Timur Tahun 2005-2009**

Pada pendekatan makro dijelaskan untuk menjamin kelancaran produksi suatu perusahaan harus memperhatikan kondisi perekonomian secara makro dan membuat keputusan mengenai stok berdasarkan kondisi tersebut. Contohnya perusahaan melakukan penimbunan bahan baku karena adanya kenaikan harga bahan baku. Dalam hal ini perubahan stok bisa dimasukkan dalam komponen pembentukan modal (investasi). Sementara dengan menggunakan pendekatan mikro, diasumsikan bahwa perusahaan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok baik untuk bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi untuk kelancaran produksi.

Hasil penghitungan ICOR selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat di tabel 4.13. Besaran ICOR yang dihasilkan tahun 2005 sebesar 3,09, sedangkan untuk tahun 2006 sampai 2008 masing-masing sebesar 3,18; 3,05

Tabel 2.17. ICOR Jawa Timur Tahun 2004 - 2009

Tahun	ICOR
(1)	(2)
2005	3,09
2006	3,18
2007	3,05
2008*	3,04
2009**	3,60

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

dan 3,04. Sementara pada tahun 2009 mencapai 3,60. Secara umum ICOR negara-negara sedang berkembang berkisar antara 2,0 sampai 5,0. Selama 5 (lima) tahun terakhir, ICOR Jawa Timur rata-rata per tahun sebesar 3,19. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan cukup efisien.

Angka ICOR Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 3,60, ini dapat diartikan bahwa untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 3,60 unit. Sementara jika dibandingkan dengan besaran ICOR pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 unit output memerlukan investasi sebesar kurang lebih 3,04 unit. Untuk lebih jelasnya pernyataan di atas dapat diartikan untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar rupiah pada tahun 2008 diperlukan investasi sebesar Rp. 3,04 milyar. Sementara itu untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar Rp. 1 milyar pada tahun 2009 diperlukan investasi sebesar Rp. 3,60 milyar. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa efisiensi permodalan 2009 tidak sebaik tahun 2008. Kemungkinan salah satu penyebab kondisi ini adalah semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

- ***Perkembangan Jumlah Investor Berskala Internasional (PMDN/PMA) Jawa Timur Tahun 2005-2009***

Angka realisasi penanaman modal mengindikasikan tingginya aktivitas investasi di Jawa Timur. Realisasi investasi yang berasal dari modal asing maupun modal dalam negeri menunjukkan angka yang variatif. Pada tahun 2005 baik PMDN maupun PMA mengalami kenaikan masing-masing sebesar 32,91% (Rp. 5,39 trilyun) dan 50,68% (539,10 juta US \$). Walaupun sekitar bulan Oktober tahun 2005 ada kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM hingga 85% tapi tidak menyurutkan niat investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan kenaikan yang cukup signifikan dari nilai investasi yang ditanamkan di wilayah Jawa Timur pada tahun 2006 baik dari modal dalam negeri maupun modal asing yaitu sebesar 3.006,69% (Rp. 167,45 trilyun) dan 172,22% (1.467,55 US \$). Namun di tahun 2007 dan sampai dengan 2009 kondisi di atas berubah cukup drastis nilai investasi semakin lama semakin menurun. Tahun 2007 nilai investasi turun 87,04% untuk PMDN sedangkan PMA sekitar 41,99%. Begitu juga pada tahun 2008

menurunkan

investor dalam negeri (PMDN) semakin menurunkan nilai investasinya menjadi Rp. 19,93 trilyun atau turun 8,14% dibanding tahun sebelumnya. Sementara PMA nilai investasinya terjadi sebaliknya yaitu naik sekitar 214% (2.676,88 juta US \$). Kemudian tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup berarti baik PMDN maupun PMA masing-masing sebesar 52,31% dan 47,14%. Rendahnya angka realisasi penanaman modal dalam negeri maupun modal asing menggambarkan pelemahan aktivitas investasi di Jawa Timur. Setelah mencatat angka yang cukup tinggi di tahun sebelumnya, realisasi investasi di Jawa Timur mulai menurun. Dari Liaison diketahui bahwa industri di Jawa Timur umumnya menunda investasi sambil mengamati perkembangan ekonomi terkini (Kajian Ekonomi Regional Prov. Jatim/2009).

Tabel 2.18 Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMDN/PMA) Tahun 2005 – 2009

Tahun	Sumber Modal			
	PMDN (000 000 Rp)		PMA (000 US \$)	
	Abs	%	Abs	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	5,389,950	32.91	539,098	50.68
2006	167,449,038	3,006.69	1,467,546	172.22
2007	21,700,120	(87.04)	851,292	(41.99)
2008	19,933,800	(8.14)	2,676,883	214.45
2009	9,506,602	(52.31)	1,415,047	(47.14)

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
Keterangan : Tahun 2009 keadaan s/d bulan September

• **Perkembangan ILOR Jawa Timur**

Kontribusi perekonomian Jawa Timur terhadap Nasional mencapai 15%, dengan kondisi ini Jawa Timur dapat dianggap sebagai barometer perekonomian nasional setelah DKI Jakarta. Sampai saat ini perekonomian Jawa Timur masih ditopang oleh tiga sektor utama yaitu perdagangan, industri, dan pertanian.

Tabel 2.19 ILOR Jawa Timur Tahun 2005-2009
(Tahun Dasar 2000)

Tahun	ILOR	
	Per tahun	Rata-rata
(1)	(2)	(3)
2005	0,07	0,03
2006	0,02	0,01
2007	0,05	0,04
2008*)	0,01	0,02
2009**)	0,03	0,03

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur.
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Sementara

Sementara itu pembangunan yang hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. Terutama setelah munculnya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 lalu dan kenaikan harga BBM tahun 2005. Salah satu permasalahan yang merisaukan saat ini adalah makin meningkatnya kesenjangan tingkat pendapatan dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.

PDRB Provinsi Jawa Timur baik ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) maupun ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) terus meningkat, seiring dengan berkembangnya perekonomian Jawa Timur. Dengan melihat besaran angka ILOR, dapat diketahui pengaruh dari perubahan PDRB (ADHK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

Dari perhitungan rata-rata ILOR per tahun (dengan Kenaikan Nilai PDRB ADHK tahun 2000), dalam kurun waktu 5 tahun (2001-2005), diperoleh perbandingan antara penambahan tenaga kerja dengan penambahan besaran atau nilai output (ILOR) secara rata-rata 0,03. Selanjutnya pada periode tahun (2002–2006); periode (2003–2007); dan periode (2003–2008) rata-rata besaran ILOR adalah 0,01, 0,04 dan 0,02. Pada periode lima tahun terakhir (2004–2009); rata-rata besaran ILOR meningkat sedikit menjadi sebesar 0,03.

Mencermati kondisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara penambahan penyerapan tenaga kerja dengan penambahan nilai output sangat kecil. Besaran ILOR setiap tahunnya sangat bervariasi. Nilai ILOR tertinggi terjadi pada tahun 2005 dengan angka ILOR sebesar 0,07, sedangkan ILOR terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,01, artinya kenaikan output pada periode 2008 tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga kerja.

Pada tahun 2008 angka ILOR mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan angka ILOR tahun 2007. Pada tahun 2007 angka ILOR sebesar 0,05, sedangkan pada tahun 2008 menjadi sebesar 0,01. Kondisi ini bisa diartikan bahwa pada tahun 2008, penambahan 100 juta rupiah PDRB hanya diikuti oleh penambahan 1 (satu) orang tenaga kerja. Kondisi ini dimungkinkan mulai diberlakukannya perampingan tenaga kerja di beberapa perusahaan besar akibat terkena dampak krisis keuangan global. Sementara pada tahun 2009 seiring dengan berkurangnya jumlah pengangguran di Jawa Timur angka ILOR meningkat lagi menjadi sebesar 0,03, artinya setiap penambahan 100 juta rupiah PDRB sudah mampu menyerap 3 (tiga)

orang

orang tenaga kerja. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dengan masih rendahnya ILOR, berarti masih rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh peningkatan nilai output di wilayah Jawa Timur.

• **Persentase Koperasi Aktif Jawa Timur Tahun 2004-2009**

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi karena kegiatan usaha koperasi lebih banyak berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan.

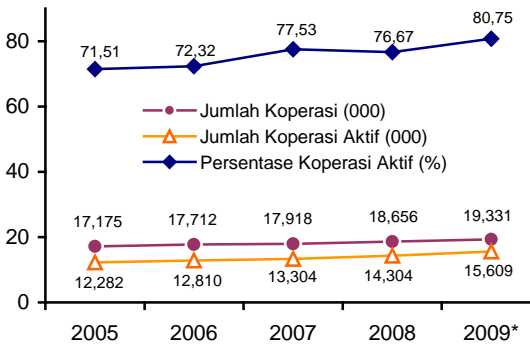
Tabel 2.20. Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Jawa Timur Tahun 2004-2009

No.	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009*
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Koperasi	17,175	17.712	17.918	18.656	19.331
2	Jumlah Koperasi Aktif	12.282	12.810	13.891	14.304	15.609
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	71,51	72,32	77,53	76,67	80,75

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM
Keterangan : * Angka Sementara

Pada tahun 2009, jumlah koperasi aktif di Jawa Timur sebanyak 15.609 unit dari 19.331 unit koperasi yang ada atau sebesar 80,75% dari total koperasi. Persentase koperasi aktif pada tahun 2009 meningkat sebesar 4,08% point dibanding dengan tahun 2008.

Gambar 2.6. Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Jawa Timur Tahun 2004-2009



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM
Keterangan : * Angka Sementara

Pada gambar 4.14 dapat dilihat perkembangan koperasi selama lima tahun terakhir. Sejak tahun 2005 jumlah koperasi total dan jumlah koperasi aktif di Jawa Timur selalu meningkat. Namun jika dilihat dari persentase koperasi aktif terhadap jumlah koperasi total tahun 2005

sampai

sampai dengan 2007 persentase koperasi aktif selalu meningkat, tetapi pada tahun 2008 persentase koperasi aktif menurun sebesar 0,86% point dari 77,53% menjadi 76,67%.

• **Perkembangan Jumlah UKM Non BPR/IKM UKM Jawa Timur Tahun 2006-2009**

Peranan UKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional maupun regional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kontribusi UKM terhadap PDRB Jawa Timur mencapai 52%. Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Oleh karena itu pengembangan UKM menjadi salah satu fokus pembangunan nasional dan khususnya di Jawa Timur.

Tabel 2.21. Perkembangan Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM di Jawa Timur Tahun 2006-2009

No.	Uraian	Tahun			
		2006	2007	2008	2009*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah UKM	2.515.291	2.588.989	2.663.552	2.740.928
2	Jumlah UKM Non BPR/LKM	2.504.634	2.578.099	2.651.855	2.728.669

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : *)Angka Sementara

Hasil pendaftaran perusahaan Sensus Ekonomi Tahun 2006, jumlah UKM Non BPR/LKM pada tahun 2006 sebanyak 2.504.634 usaha atau 99,58% dari total UKM. Jumlah usaha yang bergerak di sektor Perdagangan besar dan eceran merupakan yang terbanyak yaitu 914.080 usaha atau 36,50% dari total UKM Non BPR/LKM, sedangkan paling sedikit usaha sektor Listrik, gas dan air sebanyak 1.148 usaha atau 0,05% dari total UKM Non BPR/LKM.

Pada tahun 2007, jumlah UKM Non BPR/LKM meningkat sebesar 2,93% dari 2.504.634 usaha menjadi 2.578.099 usaha. Perkembangan tahun 2008 lebih rendah dari tahun 2007 yaitu sebesar 2,88%, sedangkan tahun 2009 jumlah UKM Non BPR/LKM diperkirakan

diperkirakan

akan meningkat sebesar 2,91% dari 2.651.855 usaha pada tahun 2008 menjadi 2.728.669 usaha pada tahun 2009.

• **Pengelolaan Sumber Daya Alam Jawa Timur Tahun 2008-2009**

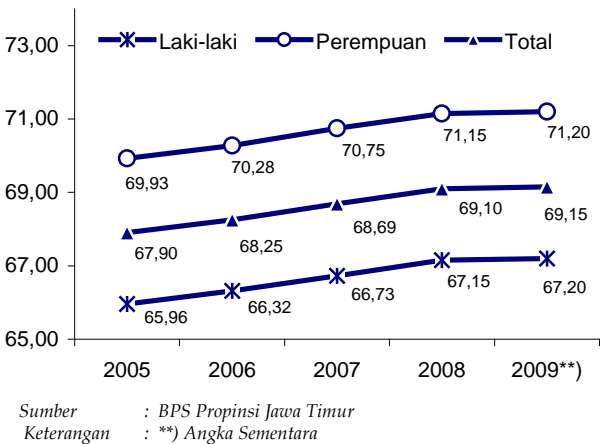
Jawa Timur adalah salah satu provinsi Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya energi dan mineral yang beragam dan melimpah. Jika ditelusuri dari arah Utara ke Selatan (mulai dari pesisir dan perairan Laut Jawa sampai dengan pesisir Lautan Hindia) dan dari arah Barat ke Timur (mulai perbatasan Jawa Timur – Jawa Tengah sampai dengan pesisir Selat Bali, ditemui sumber dan pusat-pusat kekayaan alam yang bisa dikelompokkan menjadi dua sumber daya mineral: mineral energi (minyak dan gas bumi serta panas bumi) dan mineral bahan galian logam/non-logam/industri (pasir timah, sulfur, fosfat, mika, belerang, fluorit, felspar, ziolit dan diatomea). Di tengah krisis energi serta menipisnya jumlah cadangan migas di Indonesia, potensi sumber daya mineral energi di Jawa Timur merupakan angin segar yang membawa optimisme masa depan sumber daya energi di Indonesia. Dari data yang ada yang bersumber dari Dinas Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jawa Timur, khususnya pengelolaan mineral bahan galian diperoleh data luas areal sebesar 6.649,03 Ha atau hanya 0,16 % dari total luas wilayah budidaya produktif. Walaupun luas areal yang semakin berkurang setiap tahunnya karena persediaan yang semakin terbatas, namun produksi yang dihasilkan masih mengalami peningkatan sebesar 63,7 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. **Kinerja indikator prioritas pembangunan sosial**

• **Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Jatim Tahun 2005-2009**

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Jawa Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2005 AHH penduduk Jawa Timur sebesar 67,9 tahun meningkat menjadi 69,15 tahun pada tahun 2009. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, umur

Gambar 2.7.
Angka Harapan Hidup Penduduk Jawa Timur
Tahun 2005 - 2009



harapan

harapan hidup perempuan dari waktu ke waktu selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 71,20 tahun untuk perempuan dan 67,20 tahun untuk laki-laki pada tahun 2009.

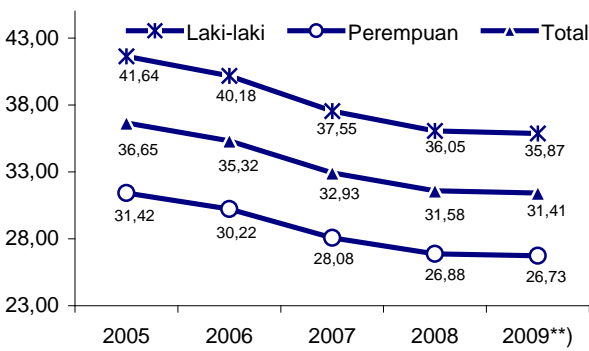
Meningkatnya umur harapan hidup ini secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Seiring dengan semakin meningkat-nya umur harapan hidup, jumlah penduduk lanjut usia akan semakin meningkat. Upaya peningkatan umur harapan hidup penduduk perlu diiringi dengan upaya peningkatan kualitas kesehatannya, supaya penduduk tersebut dapat hidup lebih lama yang ditunjang kondisi tubuh yang sehat dan tidak menjadi beban bagi penduduk yang lainnya. Apabila diperhatikan menurut wilayah, sekitar 19 kabupaten/kota angka harapan hidupnya masih di bawah angka yang dicapai Jawa Timur pada tahun 2009 (69,15). Ada beberapa daerah angka harapan hidupnya sudah menunjukkan angka yang cukup tinggi (di atas 70 tahun) yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Gresik, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya. Sementara itu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep adalah wilayah dengan angka harapan hidup terendah (di bawah 65 tahun) yang mana juga merupakan wilayah dengan angka kematian bayi tertinggi di wilayah Jawa Timur. Tinggi rendahnya AHH juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi lingkungan perumahan yang sehat dan pola konsumsi makanan yang berimbang.

• **Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Jatim Tahun 2005-2009**

AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun AKB per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (*hard rock*), antara 40-70

Gambar 2.8. Angka Kematian Bayi Jawa Timur Tahun 2005 – 2009



Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur
Keterangan : **) Angka Sementara

tergolong

tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan (*medium rock*), dan lebih besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan (*soft rock*).

Dalam beberapa tahun terakhir AKB di Jawa Timur mengalami penurunan, dari 36,65 per 1.000 kelahiran hidup (tahun 2005) menjadi 31,41 per 1.000 kelahiran hidup (tahun 2009). Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, angka kematian bayi pada laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan bayi perempuan, yaitu 35,87 untuk bayi laki-laki dan 26,73 bayi perempuan pada tahun 2009. Angka-angka ini harus terus diupayakan lagi untuk turun meskipun angka yang dicapai sudah cukup baik, karena menurunnya AKB merupakan gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini seringkali dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan di bidang kesehatan di Jawa Timur.

Turunnya angka kematian bayi ini antara lain didukung karena adanya peningkatan penolong persalinan oleh tenaga medis, keberhasilan program KB, peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, seiring itu pula semakin baiknya pengetahuan masyarakat akan kesehatan.

Ada 19 kabupaten/kota yang AKB-nya telah lebih baik dari angka yang ingin dicapai Jawa Timur pada tahun 2009 (31,41). Akan tetapi keberhasilan ini tidak terjadi di semua wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk beberapa daerah masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius karena AKB-nya masih cukup tinggi, di antaranya adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan wilayah pulau Madura. Di daerah itu juga menunjukkan persentase penolong persalinan oleh tenaga medis cukup rendah. Trend AKB di wilayah tersebut yang masih tinggi menjadi input bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, terutama pembangunan di bidang kesehatan. Selain itu tingginya AKB juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang perlu dipacu dari sisi pembangunan manusianya.

Angka Kematian Bayi dapat ditekan dengan penanganan yang intensif dari faktor eksternal antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang representatif dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan. Adapun penanganan faktor internal melalui perhatian dan perlakuan rumah tangga terhadap bayi. Sementara itu untuk faktor internal lainnya melalui pola pemberian ASI dan imunisasi.

Rasio

- **Rasio Posyandu per Satuan Balita Jawa Timur**

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah ujung tombak pemantauan gizi balita. Posyandu merupakan garda paling depan bagi upaya pemantauan tumbuh kembang balita, dengan menghimpun peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Dalam Posyandu terdapat lima program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Cakupan wilayah kerja Posyandu berbeda-beda di setiap wilayah, namun umumnya sesuai satuan lingkungan setempat yang terkecil (RT/RW/Dusun) dengan tingkat aktifitas yang berbeda pula, tergantung keaktifan dari Kader penggerak Posyandu.

Selama 2008-2009, jumlah Posyandu di Jawa Timur mengalami peningkatan dari 38.882 menjadi 39.035 Posyandu, atau mengalami peningkatan sebesar 0,39%. Namun demikian, peningkatan jumlah Posyandu ini belum meningkatkan potensi layanan, karena berdasarkan rasio Posyandu per satuan balita selama 2008-2009, tetap 13 Posyandu untuk setiap 1.000 balita.

- **Persentase Balita Bergizi Buruk Jawa Timur**

Terlalu konservatifnya target gizi buruk balita dalam indikator Indonesia Sehat 2010, cukup beralasan karena cukup buruknya gambaran situasi gizi balita pada saat penyusunan indikator Indonesia Sehat 2010. Hal ini ditandai oleh prevalensi gizi kurang pada balita yang telah mengalami penurunan dari 37,5% (1989) menjadi 24,6% (2000), namun meningkat kembali menjadi 31% pada tahun 2001. Merebaknya kembali kasus gizi buruk di beberapa wilayah, disebabkan lemahnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta menurunnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu langkah strategis dalam mensikapi situasi ini melalui upaya revitalisasi Posyandu.

Balita gizi buruk di Jawa Timur terus mengalami penurunan persentase, dari 5,95% tahun 2005 (BPS, 2006), tahun 2007 sebesar 4,80% (Riskesdas 2007), dan hasil survei gizi balita di Jawa Timur tahun 2008-2009, persentasenya sebesar 4,47% tahun 2008 dan 4,33% tahun 2009. Dengan demikian maka target dalam Indikator Indonesia Sehat 2010, sudah tercapai jauh sebelum tahun 2010. Secara nasional target ini juga terlampaui, karena tahun 2005 balita gizi buruk sebesar 8,80%.

Perkembangan

- **Perkembangan Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Jawa Timur**

Jumlah pasangan usia subur di Jawa Timur bertambah dari 7.536.308 pasangan pada tahun 2008, menjadi 7.580.926 pasangan pada tahun 2009, atau mengalami peningkatan sebesar 0,59% setahun. Sedangkan persentase akseptor KB di Jawa Timur Tahun 2008 - 2009 juga mengalami peningkatan dari 59,54% menjadi 63,45%, dengan kata lain terjadi peningkatan dari 595 menjadi 634 akseptor KB setiap 1000 pasangan usia subur. Peningkatan rasio akseptor KB lebih dominan karena penggunaan kembali alat KB pada pasangan yang pernah menggunakan. Walaupun demikian persentase akseptor KB tahun 2009 ini masih terpaut sekitar 6,55% dari target dalam Indonesia Sehat 2010.

Alasan pasangan usia subur yang tidak pernah menggunakan alat KB terutama karena alasan lainnya (terutama harga alat KB) sebesar 41,40% dan alasan fertilitas sebesar 28,90%. Faktor utama pasangan usia subur tidak menggunakan lagi alat KB karena ingin punya anak (59,10%), terutama karena pasangan tersebut segera ingin punya anak (kurang dari 2 tahun). Sementara itu, alat KB yang banyak dipakai oleh pasangan usia subur di Jawa Timur adalah suntikan KB (55,91%) dan pil KB (24,31%).

- **Rasio Dokter per Satuan Penduduk Jatim Tahun 2008-2009**

Rasio dokter per satuan penduduk di Jawa Timur 2008-2009, masih sangat rendah, yaitu 0,063 tahun 2008 dan 0,066 tahun 2009 per seribu penduduk atau 6 dokter setiap 100.000 penduduk. Rasio ini masih sangat rendah dibandingkan dengan target dalam Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk.

- **Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Jawa Timur Tahun 2008-2009**

Jumlah rumah sakit di Jawa Timur, selama 2008-2009 mengalami pertambahan dari 222 menjadi 226 rumah sakit. Pertambahan tersebut terjadi pada rumah sakit milik swasta yang bertambah 4 rumah sakit, sedangkan jumlah rumah sakit pemerintah masih tetap, yaitu 48 rumah sakit (2008-2009). Sementara itu, jumlah rumah sakit swasta lebih besar dibandingkan rumah sakit Pemerintah, yaitu dari 174 rumah sakit swasta di tahun 2008, bertambah menjadi 178 rumah sakit di tahun 2009.

Dari

Dari jumlah tersebut, maka rasio rumah sakit per satuan penduduk di Jawa Timur 2008-2009 relatif tetap yaitu 0,070 rumah sakit per 10.000 penduduk atau 7 rumah sakit per 1.000.000 penduduk.

- **Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Jawa Timur Tahun 2008-2009**

Jumlah tenaga medis di Jawa Timur 2008-2009 mengalami pertambahan, dari 2.650 tenaga medis tahun 2008 bertambah menjadi 2.832 tenaga medis tahun 2009. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka terjadi peningkatan rasio dari 0,101 menjadi 0,108 tenaga medis setiap 1.000 penduduk. Atau setiap 100.000 penduduk terdapat 1 orang tenaga medis selama 2008-2009.

- **Angka Melek Huruf Umur 15 Tahun Keatas Jawa Timur Tahun 2008-2009**

Dalam elemen pengetahuan, melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, melek huruf juga menjadi dasar bagi setiap manusia untuk pertama kali mempelajari dan mengetahui bagaimana upaya dalam membangun. Ini yang menjadikan indikator melek huruf, sebagai indikator paling esensial di antara indikator pembangunan manusia yang lain. Demikian pentingnya indikator ini, maka dalam formulasi *Human Development Index* (HDI), untuk pengetahuan, tingkat melek huruf memiliki bobot yang lebih tinggi (2/3).

Sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun ke atas ini, menjadi sasaran global dan nasional. Adapun target global, tertuang dalam salah satu dari enam tujuan kerangka kerja Dakar (2000) dalam *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua), yaitu tercapainya 50 persen peningkatan melek huruf dewasa pada tahun 2015 dari situasi 1990, lebih khusus lagi untuk penduduk perempuan. Adapun situasi melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia pada tahun 1990, penduduk laki-laki adalah 86,70%, perempuan adalah 72,50%, dan total adalah 79,50% (UNESCO, 2002; 208). Maka target global Indonesia tahun 2015 untuk melek huruf usia 15 tahun ke atas, penduduk laki-laki sebesar 93,35%, perempuan sebesar 86,25%, dan total sebesar 89,75%. Target global untuk Indonesia ini lebih rendah dari sasaran nasional, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 (Bagian IV.27-5), yaitu

(Bagian

difokuskan pada kelompok usia 40 tahun ke atas, yang capaiannya di bawah 95%. Bila dibedakan menurut jenis kelamin, maka untuk penduduk perempuan dimulai pada kelompok usia 40 tahun ke atas, sedangkan untuk laki-laki dimulai pada kelompok usia 45 tahun ke atas. Gambaran bahwa melek huruf dapat menjadi cerminan jangkauan akses pada pendidikan terlihat dari gambar 5.5, yaitu terjadinya penurunan proporsi melek huruf penduduk perempuan dalam kelompok 15-39 tahun. Ini menjadi indikasi bahwa dampak pembangunan bidang pendidikan, dalam empat dasawarsa terakhir, yang diutamakan untuk memudahkan akses pendidikan (terutama melalui Program SD Inpres dan Wajib Belajar), secara nyata menurunkan hambatan bagi penduduk perempuan.

Sementara itu, sebaran permasalahan melek huruf usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, bila sasaran RPJMN 2009 dan target EFA Indonesia 2015 menjadi acuan, seperti terlihat dalam gambar 5.6. Wilayah Kabupaten dengan warna kuning adalah prioritas pemberantasan buta huruf di Jawa Timur, karena di wilayah ini target EFA 2015 melek huruf belum tercapai. Sementara untuk wilayah hijau merupakan wilayah yang telah mencapai target melek huruf EFA 2015, namun tidak memenuhi sasaran RPJMN 2009. Hanya delapan wilayah di Jawa Timur yang telah mencapai sasaran melek huruf dalam RPJMN 2009, dengan capaian melek huruf 95% atau lebih, yaitu kabupaten/kota dengan warna biru.

- **Angka Partisipasi Kasar (APK) Jawa Timur menurut Kelompok Umur Tahun 2008-2009**

APK merupakan salah satu indikator tonggak-tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Depdiknas 2005-2009) yang berlangsung saat ini. Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dilakukan melalui memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik dan intelektual. Cerminan dari kondisi ini terlihat dari APK untuk setiap jenjang pendidikan.

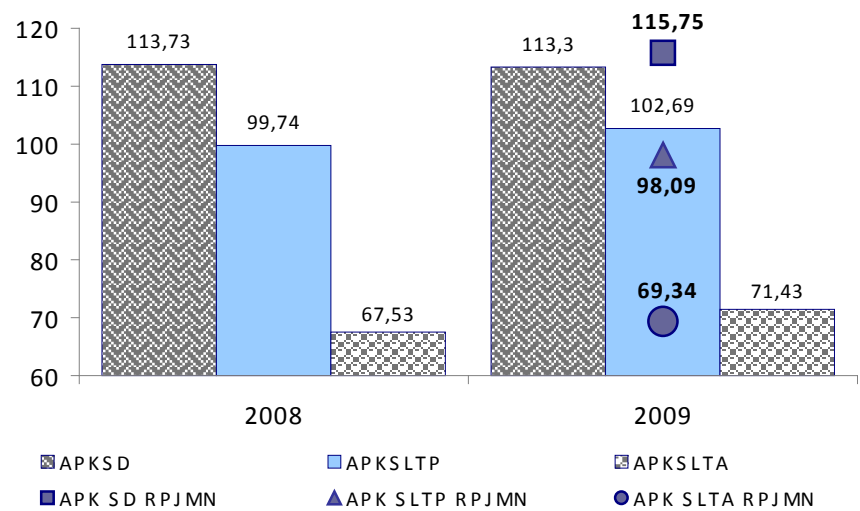
Sasaran Nasional APK tahun 2009 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009

(Bagian

(Bagian IV.27-5). Sasaran APK SD (termasuk SDLB, MI, dan Paket A) sebesar 115,76%, SLTP/MTs/Paket B sebesar 98,09%, dan SLTA/SMK/MA/Paket C sebesar 69,34%.

APK SD di Jawa Timur tahun 2009 adalah 113,30%, turun 0,40% poin dibandingkan angka tahun 2008 yaitu 113,73% dan belum mencapai sasaran APK SD dalam RPJMN yaitu 115,76% (terpaut 2,46%). Namun tidak demikian halnya untuk situasi APK SLTP dan SLTA di Jawa Timur. APK SLTP Jawa Timur, naik dari 99,74% di tahun 2008, menjadi 102,69% pada tahun 2009, atau meningkat sebesar 2,95%. Capaian APK SLTP Jawa Timur tahun 2009 ini, lebih tinggi dari sasaran APK SLTP dalam RPJMN yaitu 98,09%, yang telah tercapai pada tahun 2008. Sementara untuk APK SLTA Jawa Timur meningkat dari 67,53% di tahun 2008 menjadi 71,43% di tahun 2009, atau naik sebesar 3,90%. Capaian ini lebih tinggi 2,09% dari sasaran APK SLTA dalam RPJMN yaitu 69,34%.

Gambar 2.10. APK SD, SLTP, dan SLTA Jawa Timur 2008-2009 dan Sasaran APK SD, SLTP, dan SLTA 2009 dalam RPJMN 2005-2009 (%)



Sumber Diknas Provinsi Jawa Timur

Peningkatan APK SLTP dan SLTA di Jawa Timur 2008-2009, menjadi indikasi bahwa upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, terutama melalui program “Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun”, sesuai dengan yang diharapkan. Dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 disebutkan bahwa melalui Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, maka jumlah lulusan SLTP/MTs/SMPLB setiap tahunnya akan mengalami pertambahan. Efek dari situasi ini akan meningkatkan jumlah lulusan di tingkat SLTP dan tentu berakibat jumlah

bertambahnya partisipasi pendidikan pada jenjang di atasnya. Selain dari data APK, data yang mendukung situasi tersebut adalah meningkatnya angka transisi SLTP dari 95,45% tahun 2008 menjadi 97,48% di tahun 2009, sedangkan angka transisi SLTA juga mengalami peningkatan dari 78,98% menjadi 86,11% selama 2008-2009.

Data sebaran APK Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2009, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi, mesti dimulai dengan program lebih nyata untuk peningkatan APK pada jenjang di bawahnya terlebih dahulu. Salah satu agenda program Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 adalah Wajar Dikdas 12 tahun, maka diperlukan upaya peningkatan capaian APK SLTP, terutama untuk Kabupaten yang masih rendah capaiannya.

Jika sasaran APK tahun 2009 dalam RPJMN 2004-2009, digunakan sebagai acuan capaian KPK kabupaten/kota, maka lebih dari setengah kabupaten di Jawa Timur belum mencapai sasaran APK SD (terdapat 25 kabupaten). Jumlah kabupaten yang belum mencapai sasaran APK SLTP berjumlah 11 kabupaten dan 17 kabupaten yang memiliki APK SLTA di bawah sasaran. Fokus wilayah yang perlu mendapat perhatian dari capaian APK adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Mengingat capaian APK untuk semua jenjang pendidikan di wilayah tersebut, di bawah sasaran APK 2009 dalam RPJMN 2004-2009.

- **Angka Partisipasi Murni (APM) Jawa Timur menurut Kelompok Umur Tahun 2008-2009**

Seperti halnya APK, APM juga merupakan salah satu indikator tonggak-tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Depdiknas 2005-2009) yang berlangsung saat ini. Dalam Renstra Depdiknas 2005-2009, APM merupakan tanggung jawab dari Ditjen Mandikdasmen. Sasaran APM di setiap jenjang dalam Mendikdasmen memiliki periodisasi pembangunan yang berbeda. Untuk APM SD

ditetapkan masuk dalam periode 2005-2009, yaitu 95,00% di tahun 2009. APM SLTP masuk dalam periode pembangunan 2010-2015, yaitu tercapai 92,00% pada tahun 2015. Sedangkan APM SLTA masuk dalam periode pembangunan 2015-2020, yang ditargetkan 90% pada akhir periode pembangunan (2020).

Selama 2008-2009, terjadi peningkatan APM Jawa Timur pada jenjang pendidikan SD dan SLTA, namun tidak demikian untuk jenjang pendidikan SLTP.

Tabel 2.22. APM SD, SLTP, dan SLTA Jawa Timur 2008-2009 dan Sasaran APM dalam Renstra Depdiknas (%)

APM		SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jatim	2008	97,42	99,74	49,69
	2009	97,71	85,44	51,96
Sasaran Renstra Depdiknas	2009	95,00	-	-
	2015	-	92,00	-
	2020	-	-	90,00

Sumber : Diknas Provinsi Jawa Timur dan Depdiknas (2007)

Pada jenjang SD, terjadi peningkatan APM sebesar 0,29%, dari 97,42% tahun 2008, menjadi 97,71% tahun 2009. Untuk jenjang SLTA, APM tahun 2009 sebesar 51,96% mengalami peningkatan sebesar 2,27% terhadap besaran tahun 2008. Sementara APM SLTP turun sebesar 14,30%, dari 99,74% tahun 2008 menjadi 85,44% di tahun 2009. Terjadinya penurunan APM pada jenjang SLTP tahun 2009 yang relatif besar terhadap tahun 2008, terutama karena semakin besarnya jumlah murid di luar kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini dapat terjadi oleh dua sebab, yang pertama yaitu sebagai dampak yang terjadi 7 tahun yang lalu, besarnya keterlibatan penduduk usia kurang dari 7 tahun pada jenjang Sekolah Dasar. Sebab kedua adalah terbukanya kesempatan (sisi ekonomi, geografis, regulasi/kebijakan) yang menyebabkan penduduk yang telah berusia di atas 15 tahun, namun belum bersekolah/menamatkan pendidikan di tingkat SLTP untuk kembali melanjutkan pendidikannya di SLTP. Beberapa Program yang memungkinkan terciptanya kesempatan bagi penduduk usia di atas 15 tahun ke atas tersebut adalah melalui Wajar Dikdas sembilan tahun, serta mulai berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Dugaan ini menguat karena situasi ini tidak terjadi pada jenjang pendidikan SLTA, yang bukan target sasaran PKH.

Karena APM SLTP dan SLTA belum menjadi agenda Nasional Karena 9, maka perhatian lebih difokuskan pada APM SD. Capaian APM SD Jawa Timur telah mencapai sasaran sejak tahun 2008. Tidak

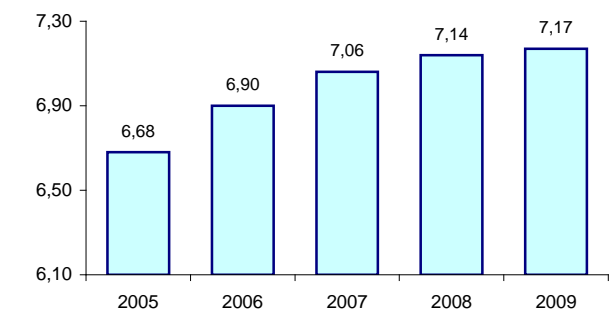
hanya pada level Provinsi, juga pada sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur telah mencapai sasaran ini. Data APM SD 2009 kabupaten/kota menunjukkan bahwa 17 kabupaten/kota lagi yang belum mencapai sasaran APM SD Nasional.

Bila diperhatikan, terdapat nilai APM yang janggal pada beberapa wilayah, karena idealnya nilai maksimum APM adalah 100%. Namun dalam data APM SD 2009 terlihat ada 12 kabupaten/kota dengan capaian APM SD di atas 100%. Ini dapat terjadi karena dua sebab, pertama dapat terjadi pada daerah yang relatif baik infrastruktur serta kualitas pendidikannya, sehingga banyak siswa dari kabupaten/kota lain bersekolah di kabupaten/kota tersebut (siswa komuter). Sebab kedua adalah terdapat permasalahan dari data proyeksi penduduk yang digunakan sebagai penyebut. Sehingga data jumlah murid usia sekolah, lebih besar dari jumlah penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan terhadap data APM khusus untuk kabupaten/kota yang nilainya lebih dari 100% tersebut, apakah memang banyak terjadi siswa/murid komuter atau tidak, sebagai acuan untuk koreksi data.

• **Angka Rata-rata Lama Sekolah Jawa Timur Tahun 2005-2009**

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2005-2009 terjadi peningkatan kualitas penduduk dari setara lulus tingkat sekolah dasar (6 tahun), menjadi setara kelas satu pada jenjang pendidikan SLTP.

Gambar 2.11. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Jawa Timur, 2005-2009



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Walaupun terjadi kenaikan, namun kenaikan tersebut relatif lambat, karena selama lima tahun hanya terjadi peningkatan sebesar 0,49 poin atau rata-rata hanya terjadi kenaikan 0,10 poin per atau kondisi ini terus terjadi, maka secara linier diperkirakan tingkat pendidikan sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas, baru setara lulus tingkat SLTP (MYS 9 tahun) pada tahun 2023, tahun 2045

setara lulus tingkat SLTA (MYS 12 tahun), dan baru tahun 2068 mencapai nilai harapan (maksimal) rata-rata lama sekolah dalam IPM, yaitu 15 tahun.

Masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas ini, terutama terjadi pada penduduk perempuan, dengan rata-rata lama sekolah sebesar 6,66 tahun atau setara lulusan SD, terpaut satu tahun lebih dengan penduduk laki-laki, yang memiliki rata-rata lama sekolah 7,73 tahun atau setara kelas satu SLTP di tahun 2009. Pembangunan pendidikan di Jawa Timur selama ini, baru membawa dampak peningkatan capaian pendidikan tertinggi penduduk di kelompok usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun setara lulusan SLTP. Sehingga tepat kiranya, salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2004-2009 untuk mengakselerasi situasi ini melalui program Wajar Dikdas 12 tahun (setara SLTA).

Walaupun bobot dalam formulasi IPM rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan melek huruf, namun dengan melakukan intervensi pada peningkatan rata-rata lama sekolah, akan memberi pengaruh signifikan pada pencapaian melek huruf. Bisa dipastikan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, akan memiliki tingkat melek huruf yang tinggi pula. Namun jika sumber daya bagi terlaksananya program peningkatan rata-rata lama sekolah adalah terbatas, maka terdapat lima belas kabupaten dengan prioritas utama (pada area merah), dimulai dari Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lamongan. Harapan yang ingin dicapai dengan intervensi pada wilayah ini adalah dampak ikutannya, yaitu terjadinya peningkatan melek huruf yang saat ini masih relatif rendah.

- **Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur di Jatim**

Salah satu faktor penyebab masuknya kelompok anak (usia 5 – 14 tahun) dalam kegiatan ekonomi antara lain buruknya kondisi ekonomi suatu keluarga. Kondisi tersebut tidak jarang ekonomi malapetaka bagi anak-anak itu sendiri, karena sektor pekerjaan yang digeluti mereka tergolong sangat berbahaya. Namun demikian informasi lengkap mengenai kegiatan ekonomi anak-anak belum secara lengkap

dan teratur disajikan, sehingga menyulitkan dalam penyusunan rencana dan pengambilan keputusan/ kebijakan dalam upaya perlindungan bagi anak yang bekerja dan penghapusan pekerjaan yang mengancam perkembangan anak.

Data pekerja anak (5 – 14 tahun) yang pernah dikumpulkan BPS secara nasional hanya melalui Sensus Penduduk 2000. Sementara pada kegiatan Sakernas hanya terbatas pada kelompok usia 10 tahun ke atas (tidak termasuk usia 5 – 9 tahun). Selanjutnya pada tahun 2009, BPS melakukan survei pekerja anak dengan sebaran sampel yang terbatas, sehingga hanya dapat disajikan pada skala Nasional.

Secara Nasional laju penurunan pekerja anak pada periode 2002 - 2006 mencapai 13% per tahun, sehingga dari jumlah 4 juta pekerja anak pada tahun 2002, menjadi sekitar 2.865.073 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 55,6% anak bekerja di sektor Pertanian. Sektor Perdagangan dan jasa berada di urutan kedua disusul industri pengolahan dengan porsi masing-masing 17% dan 13,22%. Tiga provinsi dengan pekerja anak terbesar adalah Jawa Timur dengan jumlah 414.554 orang, Jawa Tengah sebanyak 412.390 orang, dan Sumatera Utara 234.355 orang (Depnakertrans, 2006). Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga, banyak orangtua memaksa anaknya untuk bekerja sehingga diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

Dari hasil SP2000, di Jawa Timur diperkirakan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 16,84 juta anak, dari sejumlah itu sekitar 2,81% pekerja berusia 5 – 14 tahun (pekerja anak). Dengan demikian persentase pekerja dibawah umur sekitar 1%. Selanjutnya pada tahun 2009 (Hasil Sakernas Februari 2009, BPS), persentase pekerja di bawah umur sekitar 0,59%. Dengan demikian terdapat penurunan sekitar 0,41% selama kurun waktu 2000 – 2009.

Data dari Depnakertrans (2006), menyebutkan bahwa jumlah pekerja anak pada sektor Pertanian di Jawa Timur tahun 2006 sekitar 224.075 anak. Selain Jawa Timur, urutan terbesar berikutnya adalah Sumatera Utara (155.196 anak) dan Jawa Tengah (204.406 anak). Pekerjaan di sektor ini sangat berbahaya bila mē Pekerjaan pestisida, temperatur ekstrim, dan debu organik yang membahayakan kesehatan. Umumnya pekerja anak pada sektor pertanian dan perkebunan berpendidikan rendah (SD - SMP).

Upaya pemberantasan pekerja anak telah dilakukan Pemerintah dalam berbagai bentuk, diantaranya pada tahun 2002, Pemerintah telah membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) pemberantasan pekerja anak untuk jangka waktu 20 tahun. Rencana aksi tahap pertama yaitu (tahun 2004 – 2007), pemerintah telah memetakan sektor perekonomian mana saja yang mempekerjakan anak-anak. RAN telah mengeluarkan 13.922 anak dari pekerjaannya dan mencegah 29.863 anak masuk ke empat sektor pekerjaan terburuk.

Pada tahap kedua (2008-2011), RAN membuat dua strategi. Pertama, mendorong perbaikan kebijakan dan tumbuhnya lingkungan kebijakan yang mendukung penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Kedua, intervensi langsung pada empat sektor pekerjaan terburuk bagi anak untuk mencegah agar anak-anak tidak lagi bekerja di sana dan mengeluarkan anak yang telanjur bekerja di sana. Untuk strategi kedua, sangat dibutuhkan kerja sama terpadu antara pemerintah, lembaga-lembaga penanganan masalah anak, dan industri-industri yang masih mempekerjakan anak.

Fokus utama yang harus dilakukan adalah memperkuat wilayah hukum yang memberatkan siapa saja yang mempekerjakan anak dengan upah rendah dan ketidakadilan tinggi. Sedangkan, pada strategi pertama, pemerintah harus mau bersungguh-sungguh dan konsisten melaksanakan berbagai upaya untuk mencari jalan keluar guna mendukung lingkungan yang mencegah munculnya pekerja anak.

- **Rasio Penduduk yang Bekerja di Jawa Timur Tahun 2007-2009**

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilaksanakan pada Agustus 2009 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mencapai 20,338 juta orang, atau mengalami peningkatan sebesar 159,9 ribu orang dibanding dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2008 yang sebesar 20,178 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, terdapat sebanyak 19,305 juta penduduk yang bekerja. Dengan demikian jumlah pekerja di Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 442,8 ribu orang dibandingkan Agustus 2008.

Selanjutnya dari data jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja, dapat diketahui besaran angka Selanjutnya yang bekerja, yang merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Angka ratio tersebut dalam ketenagakerjaan konsep ILO, dikenal dengan istilah tingkat

kesempatan kerja (TKK). Angka ratio penduduk yang bekerja pada tahun 2009 di Jawa Timur mencapai 94,92%, artinya dari 100 angkatan kerja terdapat 95 orang pekerja.

Penyerapan tenaga kerja selama Agustus 2008 – Agustus 2009, pada pekerja perempuan lebih besar dibandingkan dengan pekerja laki-laki, yaitu masing-masing jumlah pekerja perempuan meningkat 228,6 ribu orang dan pekerja laki-laki meningkat sebesar 194,2 ribu orang. Dominasi peningkatan penduduk perempuan yang bekerja umumnya hanya sebagai pekerja keluarga. Oleh karena itu peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu memberikan implikasi yang positif terhadap peningkatan pendapatan pekerja, karena penambahan jumlah tenaga kerja hanya terserap sebagai pekerja keluarga atau membantu kepala rumah tangga/suami dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sifatnya informal.

Tabel 2.23. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2007 – Agustus 2009 (Dalam Ribuan)

Lapangan Pekerjaan Utama	2007	2008	2009
	Agustus	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(4)	(6)
Pertanian	8.391,65	8.242,33	8.287,92
Industri	2.458,40	2.412,28	2.385,68
Konstruksi	955,07	965,77	974,00
Perdagangan	3.718,38	3.775,81	3.933,11
Transportasi	865,65	923,01	993,93
Jasa Kemasyarakatan	2.023,63	2.169,34	2.347,46
Lainnya	338,62	393,74	382,94
TOTAL	18.751,42	18.882,28	19.305,06

Sumber : Sakernas 2005 – 2009, BPS Jawa Timur

Berdasarkan distribusi sektoral, jumlah tenaga kerja yang terserap pada Agustus 2009 masih didominasi oleh sektor Pertanian (42,9%). Dibandingkan dengan Agustus 2008, ada 3 sektor yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja cukup tinggi, yaitu Jasa, Transportasi dan Perdagangan yaitu masing-masing 8,21%, 7,68% dan 4,17%. Sementara sektor Industri, dan Lainnya (Pertambangan, Keuangan, Listrik, Gas dan Air) mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Nampaknya ketiga sektor tersebut yang paling kerja dampak krisis ekonomi global, sehingga akan mengalami perlambatan pertumbuhan jika tidak ada kebijakan khusus dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan pada ketiga sektor tersebut.

Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, perlu dicermati secara lebih mendalam untuk melihat kualitas perbaikannya. Dari Hasil Sakernas menunjukkan bahwa peningkatan tenaga kerja terjadi pada kegiatan informal, terutama yang dikategorikan sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak tetap (pekerja bebas baik sektor pertanian maupun non pertanian). Di sisi lain, tenaga kerja yang berada di kegiatan formal khususnya yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap mengalami penurunan dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa penyerapan tenaga kerja terjadi lebih karena inisiatif pribadi para pencari kerja tersebut dan bukan karena keberhasilan program penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan ekspansi usaha swasta. Jika melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi formal dan informal, maka pada Agustus 2009 sekitar 73,12% tenaga kerja bekerja pada kegiatan informal.

Tabel 2.24. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2007 - Agustus 2009 (Dalam Ribuan)

Status Pekerjaan Utama	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Kegiatan Formal</u>			
- Berusaha dibantu buruh tetap	586,92	581,58	552,93
- Buruh / Karyawan	4.473,07	4.535,71	4.635,85
<u>Kegiatan Informal</u>			
- Berusaha Sendiri	3.378,28	3.452,21	3.417,64
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap	4.175,13	4.254,54	4.460,27
- Pekerja Bebas di Pertanian	1.548,58	1.500,06	1.512,67
- Pekerja Bebas di Non Pertanian	914,05	997,75	1.036,94
- Pekerja Tak Dibayar	3.675,39	3.560,43	3.688,76
TOTAL	18.751,42	18.882,28	19.305,06

Sumber : Sakernas 2005 – 2009, BPS Jawa Timur

Kegiatan informal memang menawarkan peluang kerja yang lebih fleksibel dalam hal persyaratan namun lemah dalam hal jaminan keberlangsungan pekerjaan tersebut (*job security*). Pekerja pada kegiatan informal rentan terhadap gejolak ekonomi dan cenderung tidak menentu penghasilannya khususnya para pekerja bebas (pekerja tidak tetap) yang hanya bekerja sesekali saja dan berpindah-pindah majikan maupun jenis pekerjaannya. Pekerja pada kegiatan maupun umumnya tidak dilindungi oleh fasilitas kesehatan, perlindungan kecelakaan, maupun jaminan pensiun.

• **Rasio Tingkat Ketergantungan di Jawa Timur Tahun 2005-2009**

Selama periode 2005-2009 angka beban ketergantungan berkisar antara 39% sampai dengan 43%. Pada tahun 2005 rata-rata dari 10 penduduk usia produktif menanggung sekitar 4 - 5 penduduk tidak produktif. Pada tahun 2009 angka ketergantungan penduduk semakin baik yang tercermin dari penurunan angka tersebut yaitu menjadi sekitar 4, sehingga rata-rata dari 10 penduduk usia produktif menanggung sekitar 3 - 4 penduduk tidak produktif. Salah satu penyebab menurunnya angka beban ketergantungan adalah menurunnya proporsi penduduk usia muda (<15 tahun) sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas pada jangka panjang,

Sebaran penduduk menurut kelompok umur yang ditunjukkan pada Tabel 5.4 dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain : mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.25. Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan di Jawa Timur Tahun 2005-2009

Tahun	0 – 14	15 – 64	65 +	Angka Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	23,33	69,92	6,75	43,02
2006	22,61	70,43	6,97	41,99
2007	21,90	71,00	7,10	40,84
2008	21,60	71,25	7,16	40,36
2009	21,29	71,49	7,21	39,87

Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Per Propinsi 2005 - 2015

Berdasarkan struktur umur, penduduk Jawa Timur berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun) kurang dari 40%, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 10%.

• **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Jawa Timur**

Persentase

Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di

Indonesia. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia termasuk perempuan, karena demokrasi tanpa melibatkan perempuan, sudah pasti bukan demokrasi yang sesungguhnya.

Selama 2 periode terakhir, terlihat ada peningkatan wakil perempuan sebagai anggota DPRD di Jawa Timur. Pada periode 2004-2009 hanya sekitar 9,17% anggota DPRD perempuan dan angka ini mengalami peningkatan menjadi sekitar 14,72% pada periode 2009-2014. Peningkatan ini antara lain sebagai akibat pengaruh organisasi perempuan, baik di dalam maupun di luar partai-partai politik. Mereka bekerja dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan politik untuk mempermudah pemilihan dan nominasi perempuan.

Walaupun sudah ada peningkatan, akan tetapi angka tersebut masih jauh di bawah kuota untuk perempuan dalam partai politik yaitu minimal 30%, seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Parpol dan undang-undang nomor 12 tahun 2003. Rendahnya partisipasi perempuan dalam jalur politik, diduga menjadi masalah tidak terpenuhinya situasi ini.

Dalam pemerintahan, peranan perempuan tercermin dari keterlibatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Jumlah PNS di Jawa Timur tahun 2009 meningkat sebesar 3,81% dibandingkan tahun 2008. Proporsi PNS perempuan pada tahun 2009 adalah sekitar 43,88%, tampak sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 42,81%. Peningkatan tersebut juga terjadi pada semua jenjang pendidikan PNS perempuan, kecuali tingkat SMP. Peningkatan terbesar terjadi pada PNS perempuan pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi, yaitu naik sekitar 2,11%. Hal ini menunjukkan keterlibatan perempuan sebagai PNS tidak hanya meningkat dari sisi jumlahnya saja tapi juga dalam kualitasnya.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan selama 2008-2009 di Jawa Timur mengalami peningkatan, dari 2,24 setiap seratus tenaga kerja perempuan, menjadi 2,31 setiap seratus tenaga kerja perempuan atau meningkat 0,07 poin. Pada partisipasi PNS perempuan tidak terjadi peningkatan selama dua tahun terakhir yaitu 1,97 setiap seratus tenaga kerja laki-laki. Hal ini merupakan indikasi positif dalam masalah pengarus-utamaan gender dalam pemerintahan di Jawa Timur karena terjadi peningkatan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada Tahun 2009.

• **Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) Jawa Timur Tahun 2007-2009**

Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,38 pada keadaan Maret 2008 menjadi 2,88 pada keadaan Maret 2009. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,93 menjadi 0,76 pada periode yang sama (Tabel 5.5). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tabel 2.26. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) di Jawa Timur Menurut Daerah, Maret 2007- Maret 2009

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)</i>			
Maret 2007	2,76	5,01	3,91
Maret 2008	2,34	4,38	3,38
Maret 2009	2,18	3,54	2,88
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)</i>			
Maret 2007	0,79	1,49	1,15
Maret 2008	0,61	1,23	0,93
Maret 2009	0,60	0,91	0,76

Sumber : Diolah dari data Susenas Panel Maret 2007 s/d Maret 2009

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2009, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 2,18 sementara di daerah perdesaan mencapai 3,54. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,60 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,91. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada di daerah perkotaan.

• **Persentase Penduduk Berakses Air Minum Jawa: Persentase 2008-2009**

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia.

Oleh sebab itu air yang sehat dan aman yang masuk di dalam tubuh merupakan unsur kehidupan yang sangat dibutuhkan tubuh.

Air yang bersumber dari alam juga dapat beresiko tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Terlebih lagi di daerah Jawa Timur hampir 59% penduduknya menggunakan air minum dari sumur, baik sumur bor/pompa, terlindung, atau

Tabel 2.27. Persentase Penduduk yang Berakses Air Minum Tahun 2008-2009

Sumber air minum	2008	2009
(1)	(2)	(3)
Air kemasan bermerk	9.30	13.00
Leding	15.44	16.26
Sumur bor/pompa	22.36	25.10
Sumur terlindung	33.78	30.25
Sumur tak terlindung	4.78	3.13
Mata air terlindung	10.75	9.46
Mata air tak terlindung	2.26	1.61
Lainnya	1.34	1.19

Sumber : Susenas 2008-2009, BPS Jawa Timur

tak-terlindung. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (60,92 %) mengalami penurunan sebesar 2,44%. Air yang bersumber dari alam juga dapat beresiko tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Terlebih lagi di daerah Jawa Timur hampir 59% penduduknya menggunakan air minum dari sumur, baik sumur bor/pompa, terlindung, atau tak-terlindung. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (60,92 %) mengalami penurunan sebesar 2,44%. Sedangkan kabupaten/kota yang lebih dari 80% penduduknya masih menggunakan air minum sumur adalah Kabupaten Kediri (94,45 %), Kabupaten Jombang (82,29%), Kabupaten Sumenep (82,11%), Kota Blitar (82,14%), Kabupaten Blitar (81,94%) dan Kabupaten Tulungagung (87,33%). Sedikitnya masih ada sekitar 1,19% penduduk Jawa Timur memanfaatkan air sungai atau danau untuk sumber air minumnya. Lambat laun penduduk juga mulai beralih ke air kemasan bermerek apabila dirasa air tersebut lebih higienis dan praktis. Jika terjadi polusi air atau polusi lainnya yang menyebabkan tidak sehatnya sumber air minum maka bisa dibayangkan kondisi kesehatan masyarakat nantinya.

Dengan demikian pengelolaan sumber air minum merupakan tanggung jawab semua pihak, pemerintah dan swasta yang mempunyai sumber modal harus membuat kebijakan yang lebih bersifat massal, sedangkan masyarakat harus menjaga lingkungan minimal di sekitar rumah untuk menyelamatkan sumber air yang aman.

- **Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jawa Timur**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk perwujudan pergeseran nilai-nilai yang ada dalam rumahtangga. Sebuah rumahtangga yang seharusnya diwarnai dengan saling menyayangi dan mengasihi, namun akibat pergeseran nilai tersebut sering timbul kekerasan di dalamnya.

Rasio KDRT terhadap jumlah rumahtangga di Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 0,00667%. Angka rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap 10.000 rumahtangga terdapat sekitar 6 kejadian KDRT di tahun 2009. Apabila dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 terlihat mengalami sedikit kenaikan. Hal ini perlu kita cermati lebih dalam, mengingat secara absolut maupun rasio, kejadian KDRT di Jawa Timur mengalami kenaikan selama periode setahun terakhir. Ini tentunya cukup memprihatinkan kita semua.

Tabel 2.28. Jumlah KDRT dan Rumahtangga di Jawa Timur Tahun 2005 – 2009

Tahun	Jumlah KDRT	Jumlah Rumahtangga	Rasio KDRT %
(1)	(2)	(3)	(4)
2005		9.964.912	
2006		10.111.802	
2007		10.474.675	
2008*)	613	10.692.741	0,00573
2009**)	683	10.234.942	0,00667

Sumber :BPS , Th 2002-2004 Jatim Dalam Angka, Th 2005-2007
Pendataan inmakro, Susenas 2002- 2008, Tahun 2008 Angka Sementara
Catatan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, atau masalah sosial lainnya. Menilik berbagai faktor penyebab tersebut perlu dilakukan eksplorasi yang lebih luas, agar akar permasalahan dari timbulnya KDRT tersebut dapat dicarikan solusinya.

- **Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu Penduduk Jawa Timur Tahun 2004-2009**

Rasio

Selama 2008-2009, jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu mengalami pertambahan, dari 2.644 unit menjadi 2.650 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka pertambahan jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu

belum dapat mengimbangi pertambahan penduduk. Karena rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu yang semula 0,083 unit pada tahun 2008, menjadi 0,082 unit di tahun 2009, untuk setiap 1.000 penduduk, atau terdapat 8 unit (puskesmas, poliklinik, atau puskesmas pembantu) setiap 100.000 penduduk selama 2008-2009.

- **Rasio Jumlah dan Besar Kerugian Negara Terhadap APBD (%)**

Jumlah dan besar kerugian negara biasanya berkaitan dengan penyelewengan penggunaan APBN atau APBD. Dalam konteks otonomi daerah, istilah jumlah dan besar kerugian negara sering diganti dengan kerugian daerah. Artinya penyelewengan di sini lebih ditekankan penyelewengan terhadap penggunaan APBD.

Data kerugian daerah ini diperoleh dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku Badan Pengawas Penggunaan Anggaran di instansi-instansi Jawa Timur. Selain mengadakan pengawasan anggaran sendiri, Inspektorat bersama dengan Tim TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) melakukan pengawasan kerugian daerah khususnya mengenai tuntutan ganti rugi kendaraan dinas yang hilang dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Irjen yang tidak dikembalikan ke negara.

Berdasarkan laporan Biro Keuangan selaku anggota Tim TPTGR, hingga tahun 2009 perkembangan kerugian daerah periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 terdiri dari 29 kasus dengan nilai kerugian daerah Rp. 429.752.600. Selama periode tersebut telah dikembalikan ke negara melalui angsuran sebesar Rp. 303.688.950 atau masih terdapat sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 126.063.650.

Laporan yang bersumber dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 kategori yaitu temuan 01 (kerugian daerah) dan temuan 02 (temuan kewajiban setor). Kerugian daerah yang dimaksud dalam temuan 01 antara lain kelebihan pembayaran tunjangan, pekerjaan, honor/upah, biaya transport, biaya BBM, biaya pe honor/upah kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga. Sedangkan temuan 02 antara lain meliputi denda keterlambatan pekerjaan, tunggakan retribusi, kekurangan setor PAD, pajak belum dipungut dan disetor, tunggakan pajak dan kredit.

Tabel 2.29. Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Tahun 2007 - 2009

Rincian	2008	2009
(1)	(3)	(4)
Laporan Tim TPTGR		
Jumlah Kasus		29
Nilai Kerugian Daerah (Rp.)		429.752.600
Diangsuran/Ditarik (Rp.)		303.688.950
Sisa yang belum dibayar (Rp.)		126.063.650
Laporan Inspektorat Provinsi Jawa Timur		
Jumlah Temuan 01 dan 02	146	36
Nilai Kerugian Daerah (Rp.)	2.286.982.582,83	370.239.618,62
Diangsuran/Ditarik (Rp.)	1.774.609.715,69	273.169.109,90
Sisa yang belum dibayar (Rp.)	512.372.867,14	97.070.508,72

Keterangan: TPTGR=Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Laporan dari Tim TPTGR tahun 2009 adalah kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya
Temuan 01=Temuan Inspektorat tentang Kerugian Negara
Temuan 02=Temuan Inspektorat tentang Kewajiban Setor ke Negara
Laporan dari Inspektorat tahun 2009 merupakan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
sampai dengan bulan Oktober 2009
Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Dari hasil LPH Inspektorat diketahui bahwa jumlah temuan pada tahun 2009 sebanyak 36 temuan, jauh lebih kecil dengan temuan yang terjadi pada tahun 2008 sebanyak 146 temuan. Dari hasil temuan itu, nilai kerugian daerah pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebesar Rp. 2.286.982.582,83 dan Rp. 370.239.618,62. Sementara nilai kerugian yang telah dikembalikan ke negara masing-masing sebesar Rp. 1.774.609.715,69 (2008) dan Rp. 273.169.109,90 (2009), sehingga sisa yang harus dikembalikan ke negara masing-masing sebesar Rp. 512.372.867,14 (2008) dan Rp. 97.070.508,72 (2009). Dengan semakin sedikitnya temuan kerugian negara pada tahun 2009 dibanding tahun 2008 berarti penggunaan anggaran pada tahun 2009 lebih baik dan lebih efektif dibanding tahun sebelumnya. Ini sebuah keberhasilan Pemerintahan Jawa Timur yang patut dibanggakan.

2.3. ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK

Dalam segmen sub bab Isu Strategis dan Masalah Mendesak, data base analisa masalah yang menjadi acuan adalah perbandingan absolut Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita /Tahun antar Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang diklasifikasikan kedalam 4 kuadran Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita/Tahun Propinsi Jawa Timur.

Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan tingginya nilai PDRB per kapita mencerminkan rata-rata output per kapita

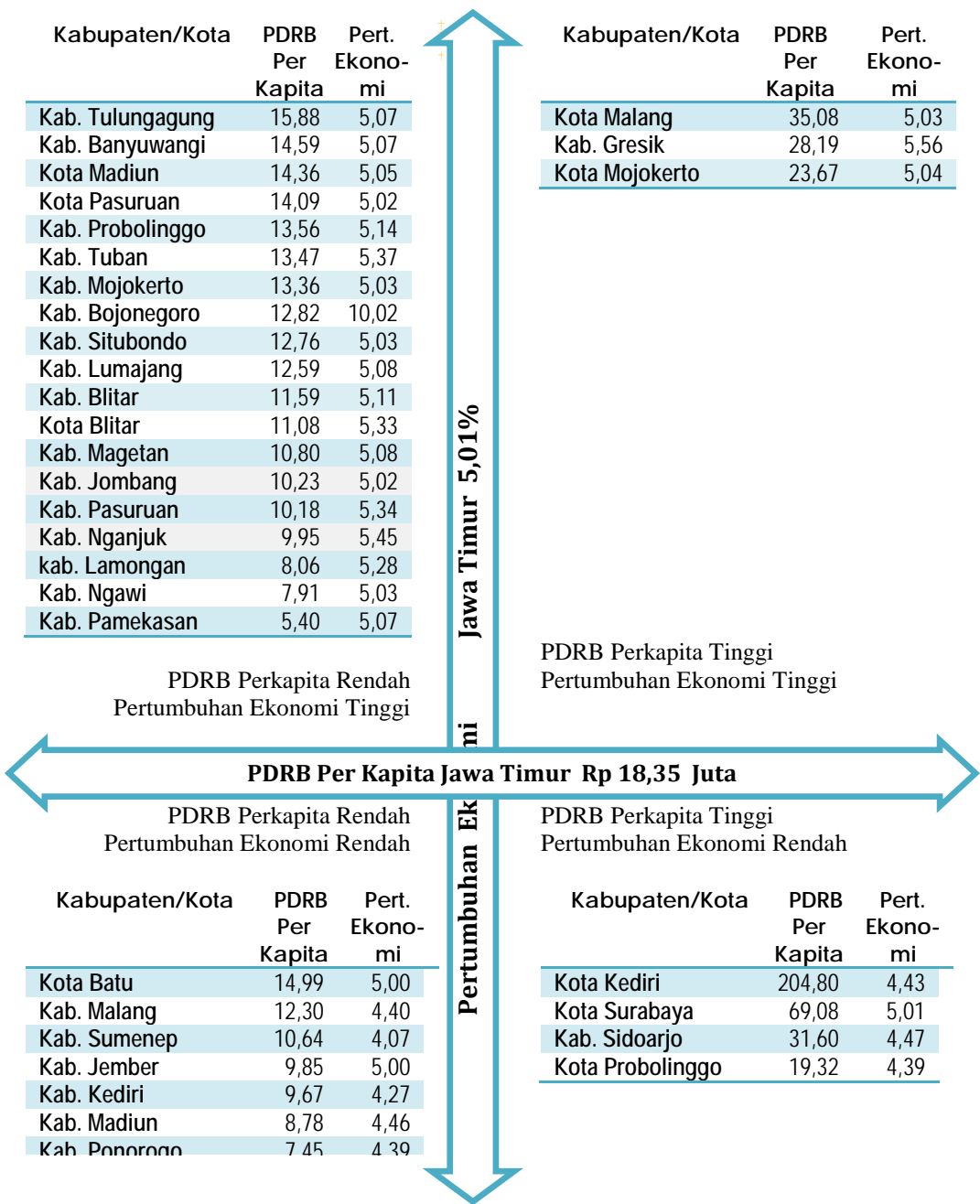
masyarakat (diharapkan bukan merupakan angka semu). Pertumbuhan ekonomi yang merata di semua sektor menunjukkan gambaran berkembangnya rantai perekonomian. Hal ini merupakan tujuan agar output per kapita masyarakat benar-benar meningkat secara riil.

Perbandingan yang dapat memberikan nilai absolut masing-masing daerah sebagai gambaran kinerja adalah dengan cara membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita Kabupaten/Kota terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita Jawa Timur. Hal menarik yang ditunjukkan oleh gambar-gambar dari hasil perbandingan disajikan pada Gambar 2.12. sebagai berikut :

- Kota Malang, Kabupaten Gresik konsisten selama lima tahun terakhir menduduki kondisi ideal (Kuadran I), karena sektor-sektor ekonomi tumbuh seiring dengan peningkatan PDRB per kapita. Sementara Kota Mojokerto terjadi perpindahan dari kuadran I ke kuadran IV atau sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kota tersebut masih rentan terhadap gejolak pertumbuhan ekonomi.
- Sementara pada periode 2005 – 2009, di Kuadran II, dengan tingkat pertumbuhan tinggi tetapi PDRB per Kapitanya lebih rendah dari rata-rata PDRB per kapita provinsi berada di kabupaten/kota dengan struktur perekonomian yang tidak didominasi oleh sektor tertentu. Ini berarti bahwa daerah-daerah yang hampir merata pembangunannya di semua sektor lebih tahan terhadap gejolak yang terjadi, seperti kenaikan harga BBM.
- Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor-sektor primer cenderung membuat daerah-daerah di Kuadran III sangat sulit untuk beranjak ke arah yang lebih baik. Sektor pertanian yang masih mempunyai peranan dominan dalam pembentukan PDRB seperti Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi dan kabupaten-kabupaten di wilayah Madura serta sebagian daerah Tapal Kuda dari tahun ke tahun terus berada pada Kuadran ini. Sebuah terobosan arah pembangunan yang signifikan perlu terus dicari untuk mengejar ketertinggalan daerah-daerah ini dengan daerah-daerah lain yang lebih maju di Jawa Timur.
- PDRB per Kapita yang tinggi tetapi tidak diiringi dengan ketertinggalan pertumbuhan ekonomi (Kuadran IV). Kota Kediri dalam lima tahun terakhir tetap tidak berubah dari kuadran ini, di duga disebabkan adanya sebuah perusahaan Industri Rokok berskala nasional yang mendorong tingginya PDRB per

kapita, meskipun tidak benar-benar mencerminkan tingginya pendapatan masyarakat.

Gambar 2.12. Perbandingan Absolut Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Kuadran Tahun 2009



Namun dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Oleh karena itu rumusan isu strategis dan permasalahan pembangunan di Jawa Timur sampai dengan tahun 2009 ini adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Seiring dengan berkembangnya arus globalisasi dan informasi yang begitu pesat akan menuntut peningkatan kualifikasi di bidang pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pencipta, pengguna, dan pemanfaat.

Hasil pembangunan bidang pendidikan di Jawa Timur menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, hal ini tercatat pencapaian APK SMP/MTs di Jawa Timur sudah Tuntas Paripurna yaitu 103,55% pada tahun 2009. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, mulai Tahun Anggaran 2008 mengambil langkah terobosan yang nyata dengan memulai merintis Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun (Wajardikmen 12 Tahun). Disamping itu tahun 2009 dan dilanjutkan pada tahun 2010 pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan pilot project pendidikan gratis di dua wilayah yaitu Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bondowoso.

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Salafiyah yang jumlahnya cukup besar di Jawa Timur, tercatat terdapat 4.064 pondok pesantren, dengan jumlah santri sebanyak 913.343 orang mempunyai kesenjangan dengan pendidikan umum, baik secara sarana prasarana maupun kurikulumnya. Proses penyetaraan pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan umum melalui Pondok Pesantren Salafiyah (pendidikan dasar), dan Pondok Pesantren mu'adalah, serta Pendidikan Diniyah formal, mengalami permasalahan besar seperti pada pendidikan umum, yakni masih rendahnya mutu pendidikan dan keterbatasan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan guru/ustadz.

Program Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional adalah untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan Angka Arab, Buta Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar). Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tahun 2009 Provinsi Jawa Timur sudah tidak memiliki buta aksara untuk penduduk usia sekolah dan penduduk usia 16 – 44 tahun. Yang saat ini tercatat sebagai penduduk buta aksara adalah penduduk usia 45 – 65 tahun yaitu sebesar 247.995 orang. Kondisi ini menurun bila dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 377.495 orang dengan rincian 111.296 orang laki-laki (29,5%) dan 266.305 orang perempuan (70,5%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memahami pentingnya pembangunan bidang pendidikan termasuk dengan menyekolahkan putra putrinya di lembaga formal. Kalaupun masih ada peserta, kemungkinan besar adalah penduduk di luar usia sekolah yang masih ingin mengikuti pendidikan membaca, menulis dan berhitung. Ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur. Namun begitu, yang perlu dicermati dan dikelola adalah penanganan pada penduduk buta aksara usia 45 – 65 tahun

dan 65 tahun keatas, walaupun pada kisaran usia ini tergolong tidak produktif lagi namun dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikatornya, sehingga menyebabkan rendahnya IPM Jawa Timur.

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja terampil dan memperhatikan kemampuan serta kondisi ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan di Jawa Timur harus diimbangi dengan SMK yang berbasis keunggulan lokal. Jumlah SMK harus ditingkatkan. Perbandingan ideal SMK dengan SMA adalah 60 : 40. Dengan pertimbangan bahwa pendirian dan pembiayaan SMK lebih mahal daripada SMA, pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber dana untuk menopang SMK. Hal itu membutuhkan komitmen para Kepala Daerah dalam mengalokasikan sumber dana. Kondisi sekolah kejuruan di Jawa Timur masih kurang dalam hal penyediaan sarana dan prasarana belajar terutama terkait dengan pemenuhan Standar Minimal bidang SMK, Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 th 2005) maupun persyaratan akreditasi. Selain itu belum banyak SMK yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal serta sedikitnya SMK yang bertaraf Internasional.

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, karena erat kaitannya dengan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Sebanyak 18 Kabupaten memiliki capaian nilai IPM dan Indeks Pendidikan lebih rendah dari nilai Jawa Timur yang sebagian besar merupakan daerah tapal kuda. Untuk meningkatkan IPM daerah dimaksud, maka program pembangunan bidang pendidikan tahun 2011 lebih diprioritaskan pada daerah-daerah rendah tersebut, yaitu Kab Probolinggo, Bondowoso, Sampang, Sumenep, Situbondo, Jember, Pamekasan, dan Bangkalan.

Dalam bidang kesehatan, Kualitas pelayanan belum optimal karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tahun 2009 di Jawa Timur terdapat 49 Rumah Sakit, 944 Puskesmas dan 2.117 Puskesmas Pembantu. ^{berarti} Rumah setiap Puskesmas melayani 39.498 orang atau belum sesuai standar dimana setiap Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Jumlah tenaga medis yang berada di unit pelayanan kesehatan (rumah sakit umum dan puskesmas) pada tahun 2008, terdapat 6.853 tenaga medis (dokter dan dokter gigi), dengan rasio terhadap 100.000 penduduk sebesar 18,78. Jumlah dokter mencapai 5.173 orang dengan rasio 14,18 per 100.000

penduduk. Standar Indonesia Sehat (IS) adalah 40 dokter per 100.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2009 telah meningkat jumlah tenaga medis sebanyak 8,386, Perawat jumlahnya : 27.574, Bidan jumlahnya : 16.467 tapi masih rendahnya rasio ini diperburuk oleh penyebaran tenaga medis yang tidak merata.

Perkembangan AKB pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan dimana pada tahun 2007 mencapai 32,9 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2008 menurun menjadi 31,58 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2009 juga mengalami penurunan menjadi 31,41 per 1000 kelahiran dan hal ini pada tahun 2010 perlu lebih dipacu penurunannya.

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2007 sebesar 349 per 100.000 ibu melahirkan hidup dan angka ini pada tahun 2008 menurun menjadi 326 per 100.000 ibu melahirkan hidup, pada tahun 2009 sebesar 82,5 per 100.000 ibu melahirkan dan hal ini pada tahun 2010 perlu lebih dipacu penurunannya.

Angka Harapan Hidup penduduk Jawa Timur pada tahun 2007 sebesar 68,7 tahun dan pada tahun 2008 sebesar 69,6 sedangkan tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 70,6 meskipun trennya sudah mengalami kenaikan namun perlu terus diupayakan peningkatannya pada tahun 2010 dikarenakan AHH semakin meningkat menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Angka Harapan Hidup perempuan dari waktu ke waktu menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 66,81 tahun untuk laki-laki, dan 70,91 tahun untuk perempuan pada 2008.

Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep merupakan wilayah dengan AHH terendah (di bawah 65 tahun), juga merupakan wilayah dengan Angka Kematian Bayi tertinggi di Jawa Timur.

Balita Gizi Buruk + Kurang Gizi (%) prevalensi pada tahun 2007 sebesar 17,4 menurun pada tahun 2008 sebesar 15,7 sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan lagi menjadi 12,7 dan pada tahun 2010 diharapkan juga terjadi penurunan. tahun

b. Tingkat Kemiskinan, Kesenjangan, dan Pengangguran

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2008 sebesar 6.651.280 jiwa (18,51%) dan pada tahun 2009 menjadi 6.022.600 jiwa (16,68 %) atau berkurang sebesar 628.690 jiwa

(1,83 %). Bila dilihat kewilayahan, penduduk miskin in didaerah pedesaan berkurang menjadi 466.570 orang sedangkan diperkotaan berkurang menjadi 162.120 orang.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebesar 6.022.600 jiwa atau setara 3.079.822 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dikategorikan atas Penduduk Sangat Miskin sebesar 493.004 RTM (16 %), Miskin sebesar 1.256.122 RTM (41 %), dan Hampir Miskin sebesar 1.330.696 RTM (43 %).

Masih tingginya penduduk miskin ini dinilai semakin memprihatinkan, walaupun Pemerintah Propinsi telah mengeluarkan beberapa program kemiskinan seperti Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM). Namun capaian melalui program pengentasan kemiskinan belum memenuhi sasaran yang diharapkan, karena sasaran program hanya mengarah pada peningkatan SDM dan bantuan modal usaha sebagai perangsang, namun nilainya masih sangat kecil karena banyaknya kriteria sasaran penduduk yang menyebar di berbagai pelosok Jawa Timur. Selain itu, akibat migrasi ke perkotaan menyebabkan ketimpangan di perkotaan ternyata lebih tinggi dari di pedesaan. Faktor-faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan disebabkan antara lain: (1) Fungsi dan efektivitas kinerja kelembagaan masyarakat yang lemah (2) Belum termanfaatkannya potensi Sumber Daya Alam secara optimal sesuai dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan (3) Belum dimanfaatkan secara optimal berbagai macam dan jenis alat Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di pedesaan.

Sementara itu, di Jawa Timur penanganan pengangguran nampaknya menunjukkan hasil yang bagus, hal ini tercatat pada tahun 2006 sebesar 1.575.299 orang atau menurun dibanding tahun 2005 yaitu sebesar 1.646.056 orang. Selanjutnya tahun 2007 turun menjadi 1.366.503 orang serta tahun 2008 turun lagi menjadi 1.296.313 orang, sedangkan tahun 2009 juga mengalami penurunan menjadi 1.033.512 orang. Walaupun terjadi penurunan terhadap jumlah pen orang tetapi tetap harus diwaspadai dan dicari jalan keluar mengenai : (1) Pertambahan Angkatan Kerja yang lebih besar dari pada Lapangan Kerja (2) Rendahnya kualitas dan ketrampilan Tenaga Kerja (3) Kasus-kasus PHK, yang dapat mendorong meningkatnya jumlah angkatan kerja (4) Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan terhadap ketersediaan lapangan kerja (5) Kurangnya Informasi Pasar Kerja dan rendahnya

Efektifitas Bursa Kerja karena lemahnya Pendataan serta terbatasnya Jaringan Pelayanan Bursa Kerja dan (6) Adanya pemulangan TKI ilegal dari negara Malaysia maupun negara lain. Selain hal tersebut, maka terdapat isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan layanan di bidang ketenagakerjaan, yaitu; (1) Pengangguran muda/terdidik terus meningkat (2) Krisis global membawa dampak tutupnya industri dan lahan usaha yang berakibat PHK (3) Meningkatnya TKI/TKW yang dipulangkan ke Indonesia (4) Sumber Daya Manusia yang rendah (5) Terbatasnya kesempatan kerja. Kompleksitas permasalahan di Bidang Ketenagakerjaan secara umum masih ditandai dengan relatif rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun ketrampilannya.

c. Rendahnya Percepatan Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Pembangunan Infrastruktur

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan namun perkembangannya masih lambat. Melalui berbagai program yang dilaksanakan belum mampu memberikan hasil yang maksimal. Permasalahan di atas juga ditandai oleh terpuruknya pabrik-pabrik yang memproduksi barang ekspor, semakin meluasnya kebijakan untuk memutuskan hubungan kerja karena kondisi unit usaha terus merugi, semakin meningkatnya angka pengangguran, semakin sempitnya lapangan kerja di daerah, semakin menurunnya produksi industri yang diekspor, semakin tidak mempunyai unit usaha dan lembaga ekonomi dalam mengembangkan produksinya, semakin melemahnya daya saing pengusaha dalam pasar bebas yang disebabkan oleh lemahnya daya saing daerah. Selanjutnya masih terdapat ketimpangan wilayah di Jawa Timur yaitu kawasan selatan Jawa Timur, Madura dan Kepulauan. Pengembangan wilayah ini menjadi prioritas, dan secara politis akan mendukung rasa persatuan dan kesatuan bangsa, karena pemerataan hasil pembangunan akan terjadi sampai ke pelosok wilayah. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih meratakan Pemerintah perekonomian masyarakat Jawa Timur dalam bidang infrastruktur antara lain : bidang perhubungan melalui percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, Jalan Tol, Jalan Akses ke kawasan Agropolitan, pengembangan sarana prasarana pelabuhan, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dan pelayaran perintis di Wilayah Kepulauan; bidang Pengembangan Sumber Daya Air melalui

pembangunan bendung gerak New Sembayat Barrage di Gresik, Waduk Gonggang di Magetan, Waduk Kedung Bendo di Pacitan, Waduk Bendo di Ponorogo, Waduk Kresek di Madiun dan bidang Keciaptakaryaan melalui pembangunan Rusunawa, RTLH, Air bersih pedesaan dan Sanitasi.

d. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Ketimpangan Wilayah

Issue strategis yang saat ini memerlukan perhatian serius adalah pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terutama konservasi dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan sebagai akibat kerusakan sumberdaya hutan, maka menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat besar dengan terjadinya banjir dan tanah longsor.

Di sisi lain masalah ketimpangan wilayah masih menjadi kendala dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Selain itu terkonsentrasinya kegiatan perekonomian pada wilayah Surabaya dan sekitarnya mengakibatkan ketergantungan wilayah lainnya. Hal ini terbukti dengan putusnya jalur perekonomian akibat lumpur Sidoarjo telah berdampak pada turunnya kinerja perekonomian beberapa daerah di sekitar wilayah Sidoarjo.

e. Bencana Alam

Propinsi Jawa Timur yang terletak diujung timur pulau Jawa dengan luas $\pm 47.921.98$ km terdiri dari beberapa pegunungan berapi yang masih aktif dan dilalui oleh sungai-sungai besar sehingga wilayah ini berpotensi untuk mengalami gunung meletus dan banjir lava/lahar, banjir bandang dan longsor. Selain itu, adanya pertemuan antara lempeng tektonik euro asia dan austro india serta adanya fenomena pemanasan global (*global warming*) mengakibatkan potensi terjadinya gempa dan dapat menimbulkan tsunami di Selatan Jawa Timur serta terjadinya angin puting beliung di berbagai daerah.

Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Timur antara lain sebagai berikut :

1. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pasu 1.Bencana Mojokerto, Madiun, Ngawi, Bojonegoro dan Gresik merupakan bencana yang diakibatkan oleh meluapnya sungai-sungai besar di sekitarnya.
2. Aktivitas Gunung berapi Bromo, Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, Gunung Kelud yang masih berstatus waspada.
3. Luapan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo.

Saat ini penanganan bencana alam yang dilakukan masih bersifat tanggap darurat, dimana upaya penanganan dilakukan pada saat dan setelah terjadinya bencana serta belum dilaksanakan secara terkoordinasi, baik dalam hal penanganan maupun pendanaan.

Mengingat besarnya potensi daerah rawan bencana di Jawa Timur, antara lain berupa kejadian gunung meletus dan banjir lava/lahar, banjir genangan/bandang dan tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan berpotensi, angin puting beliung serta kekeringan, maka diperlukan upaya penanganan secara terpadu, baik meliputi aspek pendanaan maupun pengelolaan yang melibatkan seluruh pihak terkait (pemerintah, swasta dan masyarakat).

f. Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Penegakan Supremasi Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban

Penerapan otonomi daerah masih menyisakan banyak masalah yang terkait dengan kewenangan dan sinkronisasi kebijakan, selain itu tuntutan otonomi desa semakin menguat. Mengingat desa sebagai satuan pemerintahan wilayah terkecil, selama ini lebih banyak menjadi obyek pembangunan dari pemerintah.

Berkaitan dengan penegakan supremasi hukum dan HAM bahwa Sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka, mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Kondisi tersebut juga diperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan yang masih belum memadai sehingga membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan.

Selanjutnya berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban dengan beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Jawa Timur memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat diminimalkan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal serta adanya teror ancaman

g. Terbatasnya Sumber Pembiayaan Pembangunan

Alokasi dana pembangunan Jawa Timur saat ini masih sangat terbatas, walaupun didukung dengan bagian dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat, [pada tahun 2009 sekitar Rp. 1,923 trilyun](#). Jumlah dana

riil yang ada masih belum memadai untuk dapat menuntaskan permasalahan pokok yang dihadapi Jawa Timur, lebih-lebih dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Kecilnya dana pemerintah tersebut disebabkan antara lain :

1. Terbatasnya pembiayaan pembangunan APBN/APBD
2. Terbatasnya jumlah dana perimbangan ke Propinsi
3. Belum optimalnya pengelolaan BUMD Propinsi Jawa Timur.

Pengangguran dan kemiskinan, kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan, dan lingkungan hidup merupakan kelemahan utama ketahanan perekonomian Jawa Timur. Kondisi ini pada gilirannya dapat berpengaruh negatif pada aspek sosial dan budaya dan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Sedangkan ancaman utama pembangunan adalah perkembangan global yang berakibat pada perubahan iklim ekonomi di Jawa Timur. Namun Jawa Timur sebagai salah satu provinsi strategis [memiliki potensi dan banyaknya jumlah tenaga kerja](#), kekayaan sumberdaya alam, keberagaman budaya dan letak geografis yang strategis. Di sisi lain, peningkatan kewenangan bagi pemerintah propinsi (sesuai dengan UU 32 tahun 2004) akan mempermudah pemerintah melakukan fungsi koordinasi. Dengan sejumlah kekuatan ekonomi dan sosial budaya yang dimiliki maka ancaman globalisasi dapat ditanggulangi dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat semakin menguat.

Penyediaan lapangan kerja yang cukup dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan Jawa Timur. Salah satu strategi untuk menciptakan lapangan kerja adalah [mendatangkan investasi asing dan domestik](#) sebanyak-banyaknya ke Jawa Timur, salah satunya melalui [fasilitasi dan](#) penciptaan iklim investasi yang [kondusif dan melaksanakan perijinan yang muda, cepat, tepat dan transparan dengan sistim pelayanan terpadu satu pintu](#) untuk menarik modal luar negeri atau menghambat pelarian modal keluar negeri (*capital flight*). Investasi asing dan domestik dapat ditingkatkan dengan [memberikan jaminan kepastian hukum dan memperpendek proses tahapan perijinan](#) | Selain [domestik atau asing tanpa harus mengorbankan](#) kepentingan dan hak hukum masyarakat. [Sementara itu realisasi investasi Non PMDN/Non PMA di Jawa Timur tercatat tahun 2008 sebanyak 66.057 unit usaha dengan investasi Rp.27,19 Trilyun dan menyerap tenaga kerja 446.759 orang, sedangkan tahun 2009 unit usaha sebanyak 54.443 unit usaha dengan investasi Rp.38,77 Trilyun dan menyerap tenaga kerja 365.902 orang, Jika](#)

dibandingkan dengan data tahun sebelumnya angka nilai investasi nampak lebih tinggi atau meningkat 43%.

Selain itu permintaan tenaga kerja di luar negeri selain sebagai penyumbang devisa yang cukup besar, juga merupakan peluang untuk mengatasi kelemahan yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Walaupun dalam kegiatan tersebut perlu diperhatikan hak-hak hukum tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Pemberian kemudahan dan akses informasi tentang pasar kerja akan meningkatkan peluang kerja di luar negeri.

Secara umum perekonomian Jawa Timur mulai membaik, namun pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di wilayah koridor utara, sedangkan di koridor selatan masih tertinggal yang memerlukan investasi pemerintah baik dalam peningkatan sarana fisik maupun non fisik sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah.

Selain kesenjangan regional, juga terdapat kesenjangan sektoral. Sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat kontribusinya lebih rendah dari pada sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran, walaupun masih dalam kategori yang tinggi. Sebagai propinsi lumbung pangan, keberadaan Jawa Timur sangat strategis dalam pemenuhan pangan daerah maupun kebutuhan pangan nasional. Oleh sebab itu perhatian pada sektor pertanian juga harus menjadi prioritas pembangunan dalam rangka revitalisasi pertanian.

Sektor ekonomi strategis Jawa Timur adalah industri pengolahan. Dalam rangka menangkap peluang perdagangan bebas sekaligus mengatasi ancaman produk impor, sektor ini perlu dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Untuk itu diperlukan industri berdaya saing tinggi. Namun demikian pembangunan industri harus juga mempertimbangan aspek wilayah dan lingkungan hidup. Berbagai dampak lingkungan yang dapat mengurangi derajat kesehatan harus dapat ditanggung pemerintah sebagai bagian pemenuhan hak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sektor Koperasi dan UMKM menyerap tenaga kerja yang cukup besar, walaupun memiliki kontribusi nilai tambah yang lebih kecil dari pada industri skala usaha besar. Sementara itu Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahun 2006 tercatat sebanyak 4.211.562 unit usaha. Untuk itu, UMKM harus mendapat perhatian khusus dalam strategi pembangunan karena sektor ini dapat menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dasar. Peningkatan peranan UMKM akan memberikan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha. Penenuhan hak atas pekerjaan ini harus disertai

dengan penyiapan pendidikan yang lebih berkualitas melalui perbaikan kurikulum baik di lembaga formal maupun non formal.

Diberlakukannya otonomi daerah dan meningkatnya kewenangan daerah sekaligus meningkatkan tanggung jawab yang terkait dengan tujuan otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan otonomi masyarakat akibat meningkatnya tuntutan masyarakat. Besarnya tanggung jawab tersebut tidak diimbangi oleh kapasitas fiskal yang memadai sehingga memerlukan alternatif pembiayaan. Strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan pendapatan BUMD. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui berbagai format yang dikenal dengan kerjasama antara publik dan swasta (*Public Private Partnership*) dalam mengelola BUMD. Selain itu dengan semakin besarnya tuntutan reformasi pembangunan maka proses perencanaan pembangunan secara partisipatif perlu terus dikembangkan. Pada kegiatan ini propinsi harus dapat menjadi motivator bagi pemerintah kabupaten Kota. Tentu saja hal ini harus disertai dengan aparatur yang profesional dan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Strategi pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan antara wilayah surplus dan minus semakin besar. Oleh sebab itu pertumbuhan ini harus dikompensasi dengan strategi pemerataan. Dengan demikian pembangunan ekonomi harus dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh baik bagi peningkatan derajat kesehatan, terpenuhinya kebutuhan pangan, meningkatnya tingkat pendidikan, terpenuhinya kebutuhan air bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup, tersedianya perumahan yang sehat dan serta meningkatnya partisipasi politik dan hak suara atau demokratisasi.

Strategi yang dikembangkan diharapkan mampu membantu pembangunan Provinsi Jawa Timur lebih terarah dan terfokus, berdasarkan kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Didalam implementasinya, diharapkan proses pembangunan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Perbaikan tersebut dilakukan dalam kerangka reformasi pemerintahan (*good government*) sebagai asas pelaksanaan semua program pemerintah.